

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN APARATUR DESA DAN  
PEMAHAMAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN DESA**

**(Survei pada Kantor Desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung  
Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi  
Program Studi S1 Akuntansi

**RIKA ANGGIA**

**NPM : C10160002**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS**

**BANDUNG**

**2020**



**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN APARATUR DESA DAN  
PEMAHAMAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN DESA  
(Survei pada Kantor Desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung  
Barat)**

**RIKA ANGGIA**

**NPM : C10160002**

Bandung, 10 Maret 2020

Pembimbing



**Dr. Hanifah, SE., Ak., M.Si., CA., QIA., CACP**

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



**Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP**



**Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA**

**Tanggung jawab yuridis ada pada peneliti**

**PERNYATAAN  
PROGRAM SARJANA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan nama jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak-benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, Januari 2020

yang membuat pernyataan,

(Rika Anggia)

NPM: CI0160002

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN APARATUR DESA DAN  
PEMAHAMAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN DESA**

(Survei pada Kantor Desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)

**Oleh :**

**RIKA ANGGIA**

**C10160002**

**Pembimbing :**

**Dr. Hanifah, SE., Ak., M.Si., CA., QIA., CACP**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menguji secara empiris mengenai pengaruh tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan desa pada kantor-kantor desa yang ada di kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Populasi penelitian adalah aparatur desa di kantor desa yang ada di kecamatan Ngamprah. Sementara sampel yang diambil adalah staff keuangan dan bendahara desa yang diperoleh sebanyak 38 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* yakni *purposive sampling*. Penelitian ini dibantu menggunakan software IBM SPSS versi 25.0

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, secara simultan tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan dengan nilai  $25,536 > 3.27$  dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Artinya secara bersama-sama tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan. Sedangkan secara parsial, tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Pemahaman akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan desa. Kualitas laporan keuangan desa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan sebesar 59.3%, sedang 40,7% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : tingkat pendidikan aparatur desa, pemahaman akuntansi pemerintahan, kualitas laporan keuangan**

**THE INFLUENCE OF THE EDUCATION LEVEL OF THE VILLAGE  
APPARATUS AND THE GOVERNMENT ACCOUNTING  
UNDERSTANDING OF THE QUALITY OF A VILLAGE'S FINANCIAL  
STATEMENTS**

*(Survey of the village office in the Ngamprah Sub-district of West Bandung  
Regency)*

**Written by :**

**RIKA ANGGIA**

**C10160002**

**Supervisor :**

**Dr. Hanifah, SE., Ak., M.Si., CA., QIA., CACP**

**ABSTRACT**

*This study was conducted to determine and empirically test the influence of the level of education of the village apparatus and the understanding of government accounting for the quality of village financial reports in village offices in the Ngamprah sub-district of West Bandung Regency.*

*The method used in this research is descriptive method and verification method. The study population was the village apparatus in the village office in the Ngamprah sub-district. While the sample taken was the financial staff and village treasurer obtained by 38 people. The sampling technique uses non-probability sampling namely purposive sampling. This research was assisted using IBM SPSS software version 25.0*

*Based on the results of data analysis and hypothesis testing, simultaneously the level of education of the village apparatus and the understanding of government accounting have a significant effect with a value of  $25.536 > 3.27$  and a significance level of  $0.000 < 0.05$ . This means that together the level of education of the village apparatus and understanding of government accounting have a significant effect. While partially, the level of education has no significant effect on the quality of village financial reports. Understanding of government accounting partially significant effect on the quality of village financial reports. The quality of village financial statements is influenced by the level of education of the village apparatus and understanding of government accounting by 59.3%, while the remaining 40.7% is influenced by other factors not examined in this study.*

**Keyword : Education level of village apparatus, government accounting understanding, quality of village financial report**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim.*

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan Nabi Muhammad *salallahu alaihi wasallam* sehingga dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa** ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki, mengingat adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, apabila terdapat kekurangan penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan skripsi yang telah dibuat ini di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua Orang tua yang telah banyak mendukung dan memberi sokongan semangat, serta keikhlasan dan doa yang terus mengalir.

Rasanya skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan ilmu, arahan, tenaga, waktu, semangat dan doa.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih atas terselesaikannya skripsi ini diantaranya adalah:

1. Bapak Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP selaku Ketua STIE EKUITAS.
2. Bapak Dr. Ir. Dani Dagustani, MM. Selaku Wakil Ketua I STIE EKUITAS.
3. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM., Selaku Wakil Ketua II STIE EKUITAS.
4. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM., Selaku Wakil Ketua III STIE EKUITAS.
5. Ibu Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi STIE EKUITAS.
6. Bapak Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi STIE EKUITAS.
7. Ibu Dr. Hanifah, SE., Ak., M.Si., CA., QIA., CACP selaku pembimbing skripsi dari STIE EKUITAS.
8. Ibu Erlynda Y. Kasim, SE., M.Si., Ak., CA selaku wali dosen Akuntansi 1 yang selalu memberi motivasi dan saran selama proses pembelajaran di STIE EKUITAS.
9. Teruntuk yang istimewa keluarga tercinta, Bapak Rasta, Ibu Sunaeni dan Adhiksa Malik yang selalu memberi semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terkasih Riri, Galuh Wigati, Ajeng Hoirunnisa, Ziadah, Cynthia, Rahma, Sahabat *GIRLS* yang senantiasa kebersamai perjuangan, menemani masa sulit dalam proses penyusunan skripsi ini.

11. Imelda, Cahyani, Monalisa, Yulia, Mamih Wulan, Nyai Euis, tim *Abujil Squad* tersayang yang juga banyak memberi dukungan dan gangguan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga di Pimpinan Eksekutif Madani (PEM) Formais STIE EKUITAS, Siti Mas Ajeng Hoirunnisa, Tary Oktaviantari, Latifah Nur Maryati, dan Irman Ramdhan F yang juga banyak memberi dukungan dan doa untuk penulis.
13. Tersayang Nong, Herlinoi, Mala, Ginum, Firda, Nuy yang senantiasa menemani dan membersamai penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Kakak tersayang Novita Rani, Oktaviani N, Azizah Hadiyani, Juanita yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Dan semua pihak yang terlibat dan membantu dalam pelaksanaan pembuatan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya serta memberikan manfaat dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya mengenai akuntansi pemerintahan.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh...***

Bandung, Januari 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN PROGRAM SARJANA .....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	10
1.4.1 Kegunaan secara Teoritis .....	10
1.4.2 Kegunaan secara praktisi.....	10
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	11
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	11
1.5.2 Waktu Penelitian .....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Pustaka.....	13
2.1.1 Pengertian Tingkat Pendidikan .....	13
2.1.1.1 Pengertian Tingkat .....	13
2.1.1.2 Pengertian Pendidikan .....	13

2.1.1.3	Pengertian Tingkat Pendidikan.....	14
2.1.1.4	Indikator Tingkat Pendidikan .....	16
2.1.2	Pemahaman Akuntansi Pemerintahan.....	17
2.1.2.1	Pengertian Pemahaman.....	17
2.1.2.2	Pengertian Akuntansi Pemerintahan.....	17
2.1.2.3	Standar Akuntansi Pemerintahan.....	17
2.1.2.4	Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.....	24
2.1.2.5	Laporan Keuangan Desa.....	25
2.1.2.6	Komponen Pelaporan Keuangan Desa. ....	25
2.1.2.7	Indikator Pemahaman Akuntansi Pemerintahan....	28
2.1.3	Kualitas Laporan Keuangan Desa.....	30
2.1.3.1	Pengertian Kualitas .....	30
2.1.3.2	Laporan Keuangan.....	30
2.1.3.3	Indikator Kualitas Laporan Keuangan.....	31
2.1.4	Penelitian Terdahulu .....	33
2.2	Kerangka Pemikiran .....	40
2.2.1	Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.....	40
2.2.2	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.....	42
2.3	Hipotesis Penelitian .....	47
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....</b>		<b>48</b>
3.1	Objek Penelitian .....	48

3.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	48
3.1.1.1	Sejarah Singkat .....	48
3.1.1.2	Visi dan Misi.....	50
3.1.1.3	Struktur Organisasi .....	51
3.2	Metode Penelitian .....	52
3.2.1	Metode yang digunakan .....	53
3.2.2	Definisi Variabel dan Operasional Variabel Penelitian .....	55
3.2.2.1	Definisi Variabel.....	55
3.2.2.2	Operasional Variabel .....	56
3.2.3	Populasi dan Teknik Penentuan Sampel .....	60
3.2.3.1	Populasi.....	60
3.2.3.2	Sampel .....	61
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data.....	62
3.2.5	Metode Pengujian Data.....	64
3.2.5.1	Pengujian Validitas .....	64
3.2.5.2	Pengujian Reliabilitas .....	66
3.2.6	<i>Interval Successive Method</i> (Metode Suksesif Interval).....	67
3.2.7	Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis .....	68
3.2.7.1	Analisis data .....	68
3.2.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	70
3.2.7.3	Rancangan Pengujian Hipotesis.....	73
3.2.7.4	Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t-Parsial) .	77
3.2.7.5	Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) .....	79
3.2.7.6	Analisis Koefisien Determinasi .....	80

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian.....	81
4.1.1 Gambaran Umum Responden .....	83
4.1.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	83
4.1.1.2 Responden Berdasarkan Usia .....	84
4.1.1.3 Responden Berdasarkan Pendidikan.....	85
4.1.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .....	85
4.1.2.1 Uji Validitas .....	86
4.1.2.2 Uji Reliabilitas .....	87
4.2 Hasil Penelitian.....	89
4.2.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa, Pemahaman Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat .....	89
4.2.1.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa di Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat	89
4.2.1.2 Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2) di Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Bandung Barat.....	91
4.2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Bandung Barat .....	93
4.2.2 Pengujian Hipotesis (Uji t).....	94
4.2.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	94
4.2.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda .....	100
4.2.2.3 Hasil Uji T (Parsial).....	101
4.2.3 Pengujian Hipotesis (Uji F).....	105

4.2.3.1	Hasil Uji F (Simultan).....	105
4.2.3.2	Hasil Analisis Koefisien Korelasi.....	107
4.2.3.3	Uji Koefisien Determinasi .....	108
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	111
4.3.1	Keadaan Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan di Kantor-Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Bandung Barat.....	111
4.3.1.1	Tingkat Pendidikan Aparatur Desa di Kantor-Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.....	111
4.3.1.2	Pemahaman Akuntansi Pemerintahan di Kantor-Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat .....	112
4.3.1.3	Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kantor-Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.....	113
4.3.2	Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa secara parsial .....	114
4.3.2.1	Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa secara parsial.....	114

4.3.2.2 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemerintahan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa .....	116
4.3.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa secara Simultan .....	117
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>119</b>
5.1 Kesimpulan.....	119
5.2 Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3.1	Nama-Nama Desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat .....	49
Tabel 3.2	Operasional Variabel X1 Variabel Independen Tingkat Pendidikan Aparatur Desa .....	57
Tabel 3.3	Operasional Variabel X2 Variabel Independen Pemahaman Akuntansi Pemerintahan .....	58
Tabel 3.4	Operasional Variabel Y Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan Desa .....	59
Tabel 3.5	Kriteria Penilaian Data Pengujian Validitas .....	65
Tabel 3.6	Nilai dan Tingkat Reliabilitas .....	66
Tabel 3.7	Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden .....	68
Tabel 3.8	Pedoman Pemberian Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi .....	77
Tabel 4.1	Daftar Kantor Desa yang menjadi responden penelitian .....	82
Tabel 4.2	Uji Validitas Variabel Tingkat Pendidikan Aparatur Desa .....	86
Tabel 4.3	Uji Validitas Variabel Pemahaman Akuntansi Pemerintahan .....	86
Tabel 4.4	Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Desa .....	87
Tabel 4.5	Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Pendidikan Aparatur Desa .....	88
Tabel 4.6	Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Akuntansi Pemerintahan .....	88
Tabel 4.7	Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Desa .....	89
Tabel 4.8	Tanggapan Responden mengenai Tingkat Pendidikan Aparatur Desa .....	90
Tabel 4.9	Tanggapan Responden mengenai Pemahaman Akuntansi Pemerintahan .....	91
Tabel 4.10	Tanggapan Responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Desa .....	93
Tabel 4.11	Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov Smirnov Test .....	95
Tabel 4.12	Uji Multikolinearitas .....	98

Tabel 4.13	Hasil Estimasi Persamaan Regresi .....	100
Tabel 4.14	Uji Hipotesis Parsial (Uji t) .....	102
Tabel 4.15	Uji Simultan menggunakan tabel Anova .....	105
Tabel 4.16	Koefisien Korelasi .....	107
Tabel 4.17	Interpretasi Koefisien Korelasi .....	107
Tabel 4.18	Koefisien Determinasi .....	108
Tabel 4.19	Determinasi Parsial .....	110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	45
Gambar 2.2	Paradigma Penelitian .....	46
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Kecamatan .....	52
Gambar 3.2	Contoh Skala Semantic Defferensial .....	69
Gambar 3.3	Garis Kontinum .....	70
Gambar 3.4	Korelasi Parsial .....	75
Gambar 3.5	Daerah Penolakan dan Penerimaan H0 Uji F pihak kanan .....	80
Gambar 4.1	Profil Responden berdasar Jenis Kelamin .....	83
Gambar 4.2	Profil Responden berdasar Usia .....	84
Gambar 4.3	Profil Responden berdasar Pendidikan .....	85
Gambar 4.4	Garis Kontinum Tingkat Pendidikan Aparatur Desa .....	91
Gambar 4.5	Garis Kontinum Pemahaman Akuntansi Pemerintahan .....	92
Gambar 4.6	Garis Kontinum Kualitas Laporan Keuangan Desa .....	94
Gambar 4.7	Normal P-P Plot Uji Normalitas .....	96
Gambar 4.8	Histogram Uji Normalitas .....	97
Gambar 4.9	Uji Heteroskedastisitas .....	99
Gambar 4.10	Grafik Penolakan dan Penerimaan H0 Variabel Tingkat Pendidikan Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.....	103
Gambar 4.11	Grafik Penolakan dan Penerimaan H0 Variabel Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.....	104
Gambar 4.12	Grafik Penolakan dan Penerimaan H0 Uji Simultan Variabel Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.....	106

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Formulir Pengajuan Penulisan Skripsi
- Lampiran 2 Surat Perubahan Topik/Judul Skripsi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Tugas Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Persetujuan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Bandung Barat
- Lampiran 5 Kartu Perkembangan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Kuesioner
- Lampiran 7 Rekapitulasi Data Kuesioner
- Lampiran 8 Lampiran Data Interval Kuesioner Metode MSI
- Lampiran 9 Perhitungan Validitas X1
- Lampiran 10 Perhitungan Validitas X2
- Lampiran 11 Perhitungan Validitas Y
- Lampiran 12 Perhitungan Reliabilitas X1, X2, dan Y
- Lampiran 13 Lampiran *Output* Regresi Linier Berganda
- Lampiran 14 Lampiran *Output Kolmogorov Smirnov Test*
- Lampiran 15 *Curriculum Vitae* Penulis



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah yang luas dan memiliki keberagaman suku dan budaya. Sebagai negara dengan teritori yang luas, Indonesia memiliki jangkauan pemerataan kesejahteraan yang juga lebih luas. Untuk mendukung pemerataan ke setiap wilayah yang ada di Indonesia, maka dibuatlah sistem otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah untuk dapat mengatur keperluan dan kebutuhan daerahnya. Namun masih berada di wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan begitu, masing-masing daerah dapat mencapai pemerataan yang setara sesuai dengan asal usul, kebudayaan yang berkembang dan kebutuhan masyarakatnya.

Tujuan adanya otonomi daerah ini untuk mensejahterakan masyarakat serta membentuk wilayah yang mandiri. Hal ini mewujudkan salah satu tujuan negara yang tertuang dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Tidak hanya melakukan pemerataan ekonomi di wilayah/kota besar, sistem otonomi daerah ini juga harus memastikan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pengertian desa adalah sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebagai bentuk pemerintahan terkecil dalam negara, desa diberi kewenangan tersendiri untuk melaksanakan sistem otonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Desa yang diprakarsai oleh aparatur desa memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan desa untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang merata. Pembangunan infrastruktur akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dikutip dari laman (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370>, diakses pada 25 September 2019) dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Dana Desa sebesar Rp 70,0 triliun. Dana tersebut dialokasikan kepada daerah melalui perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Optimalisasi yang dimaksud dilakukan melalui peningkatan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian desa, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tenaga pendamping desa, serta penguatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan. Pengalokasian Dana Desa yang berasal dari transfer daerah akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa ini merepresentasikan segala informasi dari realisasi transaksi dalam alokasi belanja, penerimaan dan pembiayaan desa.

Laporan Keuangan Desa pada dasarnya berpedoman pada Permendagri No. 113 tahun 2014. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa keuangan desa

dikelola oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTKD). Laporan Keuangan Desa yang dimaksud dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa di sini bertugas melakukan pengawasan atas kualitas laporan keuangan desa. Laporan yang dihasilkan meliputi laporan Neraca, Laporan Operasional (LO), laporan realisasi anggaran (LRA) serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Selain digunakan pihak internal, dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa laporan keuangan digunakan pula oleh pihak eksternal. Salah satunya adalah masyarakat. Laporan keuangan ini akan menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan desa tersebut. Apakah pengalokasian dana desa telah tepat sasaran atau belum. Oleh karena itu, laporan keuangan desa dituntut dalam mencerminkan tata kelola yang baik sesuai realitas yang terjadi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 karakteristik laporan keuangan yang baik meliputi dapat dipahami (*Understanding*), relevan (*relevance*), keandalan (*reliable*), serta dapat dibandingkan. Untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan desa yang baik dan relevan, terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM), Pengendalian Internal, dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan memerlukan pemahaman khusus yang bisa didapat melalui pendidikan formal maupun informal. Untuk dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik, aparatur desa dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai akuntansi atau ekonomi khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Di sejumlah daerah di Jawa Barat, Kepala Desa meminta adanya pembinaan dalam proses penyusunan laporan keuangan desa. Hal ini dilakukan karena format laporan yang masih terlalu rumit sehingga laporan keuangan desa yang dihasilkan tidak relevan sesuai yang diharapkan. (<https://www.pikiranrakyat.com/bandung-raya/2017/02/28/camat-dan-kepala-desa-ikuti-sosialisasi-aturan-dana-desa-394760>, diakses 27 September 2019)

Pada tahun 2017, realisasi penyaluran dana desa dari pemerintah pusat belum menyentuh satupun desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Juni. Dari jumlah 165 Desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat, hanya 53 Desa yang sudah melakukan pengajuan dana desa dan akan dicairkan. Hal ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bandung Barat memperketat laporan penggunaan dana desa. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bandung Barat, Wandiana mengemukakan bahwa dana desa hanya boleh digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Namun masih saja ada program desa yang salah sasaran. Penyalahgunaan dana desa yang terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap laporan keuangan desa. Pada periode anggaran sebelumnya, tahun 2016 masih banyak kesalahan dalam laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah desa. Sehingga pencairan dana desa tersendat dan berdampak pada alokasi dana. (<http://www.pikiranrakyat.com/jawa-barat/2017/06/06/laporan-diperketat-dana-desa-di-bandung-barat-belum-disalurkan-402572>, diakses pada 08 November 2019)

Permasalahan yang muncul pada tahun anggaran 2017, kemudian berlanjut hingga 2019. Hingga Juni 2019, lima desa di Kabupaten Bandung Barat belum menerima pencairan dana dari pusat. Kepala Bidang Penataan, Pengelolaan

Keuangan, dan Aset Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat Rambey Solihin mengungkapkan saat ditemui di Ngamprah, bahwa hal tersebut akibat desa yang bersangkutan belum menyelesaikan persyaratan pengajuan dana desa dan laporan realisasi anggaran desa. (<https://jabar.sindonews.com/read/7963/1/syarat-belum-lengkap-5-desa-di-knn-belum-dapat-add-1560863178>, diakses pada 08 November 2019)

Salah satu faktor tersendatnya pencairan dana desa di Kabupaten Bandung Barat disebabkan kesalahan-kesalahan dalam pelaporan realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh pemerintahan desa. Jelas bahwa kesalahan atas laporan keuangan disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat desa terhadap laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak relevan dan mengandung kesalahan.

Menurut Sekaran dan Bougie (2017 : 38) permasalahan yang muncul tidak harus terdapat hal yang salah dengan situasi saat ini yang perlu diperbaiki. Masalah dapat pula menunjukkan ketertarikan pada isu dimana menemukan jawaban yang tepat untuk meningkatkan situasi tersebut. Dalam hal ini permasalahan yang muncul mengenai isu kualitas laporan keuangan memiliki keterkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Diketahui bahwa minimnya kualitas laporan keuangan disebabkan oleh minimnya tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, terlepas dari perbaikan format laporan, pemerintah juga melakukan pembinaan aparat desa, pelatihan serta peningkatan kompetensi aparat desa. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimaksud meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pemahaman standar serta pembinaan yang diterima oleh aparat desa.

Tingkat pendidikan menjadi salah satu indikator kualitas Sumber Daya Manusia. Sebagaimana tujuan tingkat pendidikan yakni menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Pendidikan yang diterima oleh aparatur desa dapat berupa pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan formal dapat diraih dalam proses pembelajaran dan menghasilkan status pendidikan tertentu (SD, SMP, SM A/SMK, S1, S2 atau S3). Sedangkan pendidikan nonformal didapat dari pelatihan pembinaan yang tidak mengikat dalam status pendidikan tertentu. Misalnya seminar, pelatihan dan pembinaan yang diadakan instansi, dana tau pegalaman lain yang menambah wawasan aparatur desa.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengemukakan bahwa berdasarkan hasil pertemuan dengan kepala desa melalui acara Temu Pemimpin untuk Aspirasi Masyarakat (TEPAS) yang dibutuhkan aparatur desa adalah pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi pemerintahan desa. Sebab, keahlian yang dimiliki oleh aparatur desa sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa. Beliau menambahkan dalam pembuatan laporan pengelolaan keuangan desa masih banyak kepala desa yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan desa. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Inspektorat Jawa Barat Mohamad Yudi Ahadiat juga menuturkan selama ini kendala dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya berasal dari kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang berkualitas. (<http://jabarekspres.com/2019/laporan-keuangan-jadi-keluhan/>, diakses pada 07 November 2019)

Mengingat pentingnya latar belakang pendidikan aparatur desa, Murina dan Rahmawaty (2017) mengungkapkan pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, serta pengalaman kerja aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan pengalaman kerja aparatur desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki aparat desa, maka semakin tinggi pula pemahamannya terhadap laporan keuangan. Selain itu Sukriani (2018) mengatakan dalam penelitiannya bahwa tingkat pendidikan memiliki nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel, yaitu sebesar  $3,601 > 2,037$  dengan nilai signifikansi  $0,001$  yang lebih kecil  $0,05$ , sehingga didapatkan hasil bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor pendukung pelaporan keuangan desa, tingkat pemahaman akuntansi pemerintahan menjadi salah satu faktor yang juga berpengaruh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dijelaskan pula kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemahaman atas Akuntansi Pemerintahan dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. Karena masih ada aparatur desa yang tidak memahami proses akuntansi pemerintahan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya latar belakang pendidikan aparat desa yang tidak memiliki *basic* di bagian akuntansi. Diani (2014) mengemukakan dalam penelitiannya tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah bahwa Pemahaman Akuntansi yang dimiliki aparat desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Itu artinya, semakin tinggi pemahaman aparat desa terhadap akuntansi pemerintahan, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan desa yang dihasilkan.

Berangkat dari hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas diperlukan beberapa faktor penunjang. Diantaranya latar belakang pendidikan serta tingkat pemahaman terhadap akuntansi pemerintahan. Dalam hal ini, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap kualitas laporan keuangan yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pemahaman akuntansi pemerintahan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa” (Survei pada Kantor Desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang disimpulkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Pendidikan Aparatur Desa, Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Ngamprah.
2. Bagaimana Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas laporan Keuangan Desa secara parsial.
3. Bagaimana Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa secara simultan.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pendidikan aparatur desa, pemahaman akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan desa di kecamatan Ngamprah.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan desa di kecamatan Ngamprah secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan desa di kecamatan Ngamprah secara simultan.

Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tingkat pendidikan aparatur desa, pemahaman akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan desa di kecamatan Ngamprah.
2. Untuk menjelaskan pengaruh tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan desa di kecamatan Ngamprah secara parsial.
3. Untuk menjelaskan pengaruh tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan desa di kecamatan Ngamprah secara simultan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini dihadapkan didapat oleh penulis sebagai kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

##### **1.4.1 Kegunaan secara Teoritis**

Kegunaan penelitian secara umum adalah untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih ilmu, wawasan, dan mendukung ilmu akuntansi pemerintahan khususnya terhadap Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan atas Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan di desa.

##### **1.4.2 Kegunaan secara praktisi**

Kegunaan praktisi ini dimaksudkan dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan pertimbangan antara teori dengan situasi nyata. Terutama dalam hal

pengaruh tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan serta pemahaman yang jauh lebih luas bagi penulis. Baik secara umum mengenai akuntansi pemerintahan, maupun khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

b. Bagi Desa Yang Diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi desa-desa yang diteliti untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar menghasilkan laporan keuangan desa yang lebih berkualitas dan memenuhi standar.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan serta referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Dalam proses penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di kantor desa yang ada di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Adapun jumlah desa yang ada di Kecamatan Ngamprah sebanyak 11 (sebelas) desa, terdiri atas Desa Bojongkoneng, Desa Cilame, Desa Cimanggu, Desa Cimareme, Desa Gadobangkong, Desa Margajaya, Desa Mekarsari, Desa Ngamprah, Desa Pakuhaji, Desa Sukatani, Desa Tanimulya.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Untuk mendapat data yang diperlukan, penulis akan melakukan penelitian sesuai waktu yang ditentukan oleh Kantor Desa masing-masing di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**  
**PENELITIAN**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Pengertian Tingkat Pendidikan**

**2.1.1.1 Pengertian Tingkat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tingkat memiliki 3 (tiga) arti. Tingkat memiliki arti dalam kelas kata benda sehingga kata tingkat ini dapat menyatakan nama, tempat atau semua hal yang dibendakan. Arti kata tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis. Selain itu tingkat juga dapat diartikan sebagai tinggi rendahnya martabat (kedudukan, kemajuan, peradaban, dll).

Tingkat dapat menggambarkan posisi tinggi rendahnya suatu susunan. Dengan begitu, tingkat menjadi pembatas/pemisah antara posisi tinggi dengan posisi yang lebih rendah.

**2.1.1.2 Pengertian Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dijadikan sarana terencana guna meningkatkan kualitas pengetahuan, wawasan, kebudayaan dan kemampuan lain.

Fungsi adanya pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter generasi bangsa yang bermartabat, berwawasan dan berilmu. Keberadaan fungsi pendidikan ini sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, yakni dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **2.1.1.3 Pengertian Tingkat Pendidikan**

Menurut Hasibuan (2010) tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis secara umum. Selain itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan tingkat pendidikan adalah proses berkelanjutan yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan peserta didik, keluasan bahan pengajaran, dan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum.

Tingkat pendidikan mengambil andil dalam jumlah perkembangan peserta didik dalam mencapai penyerapan informasi. Hal itu merujuk pada perkembangan mental, sikap, karakter setiap peserta didik yang dicapai seiring dengan bertambahnya tingkat pendidikan/jenjang yang dimiliki. Tinggi rata-rata pendidikan ini akan berpengaruh pada kesiapan bangsa dalam menghadapi perkembangan global khususnya di bidang pengetahuan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memudahkan seseorang dalam proses penyerapan informasi serta pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Suhardjo, 2007 (<http://dinikomalaridpress.com>) berpendapat bahwa tingkat pendidikan formal akan membentuk nilai bagi seseorang, terutama dalam menerima hal yang baru.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tingkat pendidikan dapat dibedakan berdasarkan hal-hal tertentu, diantaranya :

1) Pendidikan Dasar

Tingkat pendidikan dasar ini terdiri atas pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun masa sekolah. Jenjang pendidikan dasar ini akan mempengaruhi jenjang pendidikan berikutnya. Karena, jenjang lanjutan merupakan proses berkesinambungan setelah jenjang dasar. Pendidikan dasar memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu :

- a. Membekali peserta didik terkait dengan kemampuan membaca, menulis, berhitung, penguasaan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi.
- b. Memberikan dasar-dasar untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Pada umumnya, keberhasilan peserta didik di jenjang pendidikan lanjutan akan dipengaruhi oleh keberhasilan pendidikan dasar.

Pendidikan dasar di Indonesia terdiri dari :

1. Sekolah Dasar atau *Madrasah Ibtidaiyah*
2. Sekolah Menengah Pertama atau *Madrasah Tsanawiyah*

2) Pendidikan Lanjutan

Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang dipersiapkan untuk peserta didik dalam mencapai kemampuan timbal balik dengan lingkungan sosial dan budaya, pengembangan karakter, watak dan keterampilan lainnya dalam menghadapi dunia kerja. Jenjang pendidikan menengah ini terdiri dari:

- a. Sekolah Menengah Atas atau *Madrasah Aliyah*
- b. Sekolah Menengah Kejuruan dan *Madrasah Aliyah Kejuruan*

Selain pendidikan menengah, jenjang pendidikan lanjutan berikutnya adalah pendidikan tinggi. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang lanjutan setelah pendidikan menengah yang meliputi program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam bermasyarakat. Diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan akademik profesional. Selain kemampuan akademik, peserta didik harus mampu menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **2.1.1.4 Indikator Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, indikator tingkat pendidikan ini meliputi :

a. Jenjang Pendidikan

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasar tingkat perkembangan peserta didik, kemampuan yang dikembangkan, dan tujuan yang dicapai dalam sistem pendidikan. Adapun telah dijelaskan sebelumnya, jenjang pendidikan ini meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

b. Kesesuaian Jurusan

Kesesuaian jurusan ini berkaitan dengan kesesuaian antara pendidikan yang ditempuh dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan di masyarakat. Jurusan pendidikan yang ditempuh dapat dikatakan sesuai apabila pendidikan yang dimiliki menghasilkan kemampuan yang dibutuhkan di masyarakat. Sebagai contoh, seorang manajer *Human Resource Development* (HRD) yang membutuhkan

karyawan *accounting* akan melakukan seleksi sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan di perusahaan. Sehingga, karyawan tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan oleh perusahaan.

## **2.1.2 Pemahaman Akuntansi Pemerintahan**

### **2.1.2.1 Pengertian Pemahaman**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman berasal dari kata dasar paham yang artinya pengetahuan banyak dan mengerti dengan benar. Pemahaman sendiri memiliki arti proses atau perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu. Menurut Sudirman yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menaksirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang diterimanya.

### **2.1.2.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Menurut PMK No. 238/PMK.05/2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

### **2.1.2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan tidak akan lepas kaitannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Berbeda dari laporan keuangan perusahaan dagang atau

jasa, laporan keuangan pemerintahan biasanya meliputi Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dimuat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) diantaranya :

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah

memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas adalah :

- a. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
- b. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah

3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;

Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Adapun ruang lingkup dari Laporan Arus Kas adalah :

- a. Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus

kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

- b. Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan negara/daerah.

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan;

Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

Ruang Lingkup Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan;
- b. Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.

5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup Akuntansi Persediaan adalah Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan

daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
  - b. Instrumen keuangan.
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkupnya meliputi :

- a. Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - b. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
  - c. Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan

perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Ruang Lingkup akuntansi aset tetap adalah :

a. Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:

a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan

b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-25 regenerative natural resources*). Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:

a. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;

b. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;

c. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi

9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup Laporan LO adalah :

Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

#### **2.1.2.4 Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurna Peraturan Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang hubungan pemerintahan daerah dan pusat, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan, peran Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan desa, penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat desa, keuangan desa, peraturan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

Berdasar Standar Keuangan Pemerintahan Pernyataan Nomor XXX mengenai Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa, tujuan pernyataan ini adalah mengatur penyajian laporan pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan dalam keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar Desa.

### **2.1.2.5 Laporan Keuangan Desa**

Dalam Standar Pelaporan Keuangan Desa disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Tujuan pelaporan keuangan desa adalah untuk meyajikan informasi atas realisasi anggaran dan posisi pemerintah desa yang bermanfaat bagi pengguna, khususnya masyarakat. Laporan Keuangan Desa juga merepresentasikan pertanggungjawaban pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola oleh pemerintah Desa.

Laporan Keuangan Desa memiliki tiga komponen utama yang terdiri atas :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa;
- b. Neraca Desa;
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Desa.

Laporan keuangan Desa harus disajikan sekali dalam setahun sesuai dengan tahun anggaran. Namun dalam situasi tertentu, tanggal pelaporan pemerintahan desa dapat berubah dan Laporan Keuangan disajikan dalam satu periode pelaporan yang lebih panjang atau justru lebih pendek dari satu tahun.

### **2.1.2.6 Komponen Pelaporan Keuangan Desa.**

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa komponen Pelaporan Keuangan Desa terdiri atas 3 (tiga), antara lain sebagai berikut :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Desa

Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola atau diberdayakan oleh

pemerintah desa untuk mencapai kesejahteraan Desa dalam satu tahun anggaran. Laporan ini memberikan perbandingan antara realisasi dengan anggaran yang sudah ditetapkan selama satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa ini memiliki beberapa unsur anggaran dan realisasi, diantaranya :

a. Pendapatan Desa.

Pendapatan diakui pada saat adanya penerimaan kas yang diterima di rekening Pemerintah Desa atau di kas Desa. Pendapatan Desa dapat diklasifikasikan atas Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain.

b. Belanja Desa.

Belanja Desa diakui pada saat adanya pengeluaran dari rekening pemerintah desa atau dari kas desa sebesar kas yang dikeluarkan. Belanja Desa dapat dikategorikan berdasarkan bidang, antara lain :

- a) Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan mendesak.

c. Surplus/Defisit Desa.

Selisih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa maka disebut surplus/defisit anggaran. Jika Pendapatan Desa lebih besar dibanding dengan Belanja Desa, maka anggaran tersebut kemungkinan mengalami surplus anggaran. Sedangkan beban lebih besar dibanding pendapatan yang diterima oleh desa, maka kondisi tersebut memungkinkan adanya defisit anggaran.

- d. Pembiayaan Desa;
  - e. Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Desa.
- 2) Neraca Desa

Pada dasarnya, Neraca Desa sama seperti Neraca laporan keuangan lain. Neraca akan merepresentasikan pos-pos akun asset, kewajiban, dan ekuitas.

a. Asset Desa

Untuk pengakuan asset dalam pelaporan keuangan desa, asset dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh ataupun diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

b. Kewajiban Desa

Kewajiban desa dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban yang timbul tersebut dicatat sesuai dengan nilai nominal.

c. Ekuitas Desa

Ekuitas Desa merupakan kekayaan bersih milik desa yang diperoleh dari selisih antara asset dan kewajiban desa selama periode pelaporan.

3) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Desa

Catatan Atas Laporan Keuangan dibuat untuk membandingkan laporan keuangan desa yang dibuat dengan laporan entitas lainnya. Pada dasarnya tidak semua pengguna/entitas dapat memahami laporan keuangan. Maka fungsi dari Catatan Atas Laporan Keuangan ini berguna untuk menjelaskan detail dari pos-pos akun yang ada pada Laporan Keuangan.

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan inilah pendapatan desa, belanja desa, asset desa, kewajiban desa, ekuitas desa, dan pos-pos akun lain diuraikan secara rinci. Sehingga pengguna informasi/entitas lain dapat memahami informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut.

#### **2.1.2.7 Indikator Pemahaman Akuntansi Pemerintahan**

Adapun Pemahaman Akuntansi Pemerintahan berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan terbagi atas beberapa indikator, yaitu :

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan, serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2. Tanggung jawab Pelaporan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan ada pada pimpinan entitas.

3. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4. Identifikasi Laporan Keuangan

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan apabila perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
  - b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
  - c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
  - d. Mata uang pelaporan; dan
  - e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
- #### 5. Periode Pelaporan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun/ periode. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Desa**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kualitas**

Kualitas dapat didefinisikan sebagai memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas adalah kemampuan produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan (Puspitawati dan Anggadini, 2014:113). Dikatakan pula sebagai totalitas tampilan dan karakteristik produk atau jasa yang berusaha keras dengan segenap kemampuannya memuaskan kebutuhan (Puspitawati dan Anggadini, 2014:113).

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah nilai atau mutu atau tolok ukur yang dijadikan acuan tingkat baik buruknya dengan sesuatu.

#### **2.1.3.2 Laporan Keuangan**

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas masing-masing entitas yang bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan.

Adapun komponen laporan keuangan meliputi sebagai berikut :

1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif;
2. Laporan Posisi Keuangan;
3. Laporan Perubahan Modal;
4. Laporan Arus Kas;
5. Catatan Atas Laporan Keuangan;

Tanggung jawab atas laporan keuangan berada pada pihak manajemen entitas.

### 2.1.3.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat karakteristik kualitatif Laporan Keuangan, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Relevan

Laporan Keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat mengubah keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta mengevaluasi atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

##### a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi yang ada memungkinkan pengguna menegaskan atau mengoreksi pendapat/ekspektasi di masa lalu.

##### b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi yang ada dapat memungkinkan pengguna memprediksi masa depan berdasarkan peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa kini.

##### c. Tepat Waktu

Informasi yang ada disajikan tepat waktu sehingga dapat mempengaruhi atau bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

##### d. Lengkap

Informasi disajikan selengkap mungkin sehingga merepresentasikan informasi yang akurat dan mendetail untuk membantu proses pengambilan keputusan.

#### 2. Andal

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya dan bebas dari kepentingan pihak manapun, tidak mengandung kesalahan yang material, menyajikan fakta yang jujur serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang ada dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Gunanya untuk mengetahui perkembangan akun-akun pos yang terjadi selama satu tahun anggaran.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mampu dipahami oleh pengguna laporan keuangan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Catatan Atas Laporan Keuangan biasanya dapat membantu menjelaskan laporan keuangan sehingga membantu pengguna dalam memahami informasi.

#### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

#### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan
1	Sasha Murina, Rahmawaty (2017)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa	Tingkat pendidikan (X1) Kualitas Pelatihan (X2) Pengalaman Kerja Aparatur Desa (X3) Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Y)	Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan, Kualitas Pelatihan berpengaruh signifikan, Pengalam Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa.	Tingkat Pendidikan (X1)  Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Y)
2	Putu Emy Susma Devi, Nyoman Trisna Herawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2017)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Dan Ukuran Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM	Tingkat Pendidikan (X1) Pemahaman Akuntansi (X2) Ukuran Usaha (X3) Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM (Y)	Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Ukuran Usaha berpengaruh positif	Tingkat Pendidikan (X1)  Pemahaman Akuntansi (X2)  Kualitas Laporan Keuangan (Y)

				dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	
3	Luh Sukriani, Putu Eka Dianita, Made Ari Wahyuni (2018)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara	Tingkat Pendidikan (X1) Pengalaman Kerja (X2) Pelatihan (X3) Penggunaan Teknologi Informasi (X4) Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara (Y)	Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Penggunaan teknologi Informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes di Kecamatan Negara.	Tingkat Pendidikan (X1) Kualitas Laporan Keuangan (Y)
4	Amy Fontanella (2010)	Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan	Latar Belakang Pendidikan (X1) Pengetahuan Akuntansi Pengguna (X2) Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Latar Belakang Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan laporan keuangan, Pengetahuan Akuntansi Pengguna berpengaruh terhadap Pemanfaatan	Latar Belakang Pendidikan (X1) Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Y)

		Pemerintah Daerah		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
5	Ni Nyoman Trisnawati, Dewa Nyoman Wiratmaja (2018)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas Sumber Daya Manusia(X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Kualitas SDM berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar, SPI berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar	Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)  Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)
6	Jhon Fiesgrald Wungow, Linda Lambey, Winston Pontoh (2016)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan dan Jabatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Tingkat Pendidikan (X1), Masa Kerja (X2), Pelatihan (X3), Jabatan (X4), Kualitas Laporan keuangan Pemerintah (Y)	Tingkat Pendidikan dan Masa Kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Pelatihan dan Jabatan berpengaruh signifikan.	Tingkat Pendidikan (X1)  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

7	<p>Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)</p>	<p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Kompetensi Staf Akuntansi (X3), Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>	<p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Staf Akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.</p>	<p>Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)  Kompetensi Staf Akuntansi (X3)  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>
8	<p>Ni Putu Yogi Merta M.S, I Made Pradana A., Edy Sujana (2014)</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan</p>	<p>Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X1) Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X2)</p>	<p>Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>

		Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)		
9	Ni Made Rika Krisna Dewi, Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, Pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah	Pemahaman Akuntansi Keuangan Daerah (X1)  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
10	Daniel Kartika, Yohanes Suhardjo (2013)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) Kualitas Aparatur	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh	Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

		Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Pemerintah Daerah (X2) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X2)
11	Chairul Anwar, Devi Meliana M. (2016)	<i>The Influence of Human Resources, Commitment Leader, the use of information technology and system internal control on the quality of local government financial report Pringsewu</i>	<i>Human Resources (X1) Commitment Leader (X2) Use of Information Technology (X3) System Internal Control (X4) Quality of Local Government Financial Report Pringsewu (Y)</i>	<i>Human resources and significant positive effect on the quality of financial statements Pringsewu Local Government. Commitment leaders positive and significant impact on the quality of financial statements Pringsewu Local Government. The use of information technology and significant positive effect on the quality of financial statements Pringsewu Local Government. The system of internal</i>	<i>Human Resources (X1) Quality of Local Government Financial Report Pringsewu (Y)</i>

				<p><i>control and significant positive effect on the quality of financial statements Pringsewu Local Government.</i></p>	
12	<p>Iskandar, Muda, dkk (2017)</p>	<p><i>The Influence of Human Resources Competency and the Use of Information Technology on the quality of local government financial report with regional accounting system as an intervening</i></p>	<p><i>Human Resources Competency (X1), The Use of Information Technology (X2), Quality of Local Government Financial Reporting with regional accounting system as an intervening (Y)</i></p>	<p><i>Partially, the Human resources competency has positive and significant influence on the regional Financial Accounting System (SAKD) in Labuhanbatu regency, the Use of Information Technology has positive and significant influence on the Regional Financial Accounting System (SAKD) in Labuhanbatu regency,</i></p>	<p><i>Human Resources Competity (X1)</i></p> <p><i>Quality of Local Government Financial Reporting (Y)</i></p>

**Sumber : Hasil Pengolahan Data**

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud pendidikan adalah proses terencana yang dilakukan manusia guna mengembangkan potensi diri, baik perkembangan spiritual, karakteristik, kecerdasan, dan keterampilan dalam bermasyarakat. Penyusunan Laporan Keuangan memerlukan pemahaman khusus yang bisa didapat melalui pendidikan formal maupun informal. Untuk dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik, aparatur desa dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai akuntansi atau ekonomi khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Proses penyusunan Laporan Keuangan Desa pada umumnya sama dengan Laporan keuangan pemerintahan daerah. Oleh karena itu diperlukan kemampuan yang mumpuni guna menghasilkan laporan keuangan tersebut. Baik tingkat pendidikan maupun pemahaman akuntansi pemerintahan, keduanya memiliki pengaruh yang penting terhadap kualitas laporan keuangan desa.

### **2.2.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa**

Dalam proses pelaporan keuangan, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut. Lemahnya teori dan praktik akuntansi pemerintahan serta kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia dalam memahami laporan keuangan pemerintah desa menjadi masalah yang tidak dapat dihindari. Trisnawati dan Wiratmaja (2018:788) berpendapat bahwa kualitas yang dimiliki sumber daya manusia dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Muda, dkk (2017:5558) yang menyatakan secara parsial tingkat kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasar tingkat perkembangan peserta didik. Adapun tujuan yang disasar dari tingkat pendidikan ini adalah pencapaian kemampuan peserta didik yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan dan produktifitas sumber daya manusia. . Sukriani, dkk (2018:87) menyatakan dalam penelitiannya, tingkat pendidikan yang memadai akan mempermudah pelaksanaan tugas yang dilakukan. Sukriani (2018:94) juga berpendapat bahwa karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan penempatannya, akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Isaiiah & Ericsson (2012) dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Ferdous, dkk (2019:1376) kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia adalah salah satu hal yang berpengaruh signifikan dalam organisasi. Dengan kompetensi yang dimiliki tersebut dapat meningkatkan kapasitas serta meningkatkan fondasi. Karena orang yang bekerja sesuai dengan jenjang, kemampuan, ketempilan yang dimilikinya, maka ia akan mampu menyelesaikan tugas tersebut (Hutapea dan Thoha,2008:86).

Kasim (2015) juga menyatakan bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu menyusun laporan keuangan dengan baik adalah salah satu faktor yang menyumbang buruknya kualitas laporan yang dihasilkan di pemerintahan.

Murina dan Rahmawaty (2017:119) berpendapat bahwa tingkat pendidikan akan menambah pemahaman aparatur desa dalam laporan keuangan. Susma Devi, dkk (2017) mendukung bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian dari Muzahid (2014) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Udiyanti, dkk (2014) mengungkapkan bahwa kompetensi staf akuntansi merupakan faktor yang penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sehingga laporan yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Wungow, dkk (2016). Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dalam pemerintah daerah. Fontanella (2010) juga mengemukakan bahwa latar belakang pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **2.2.2 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa**

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tertentu digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal pengambilan keputusan. Oleh karenanya, setiap laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang sesuai dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas Laporan keuangan dapat

diukur berdasarkan beberapa karakteristik diantaranya relevan, andal serta dapat dipahami. Untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan pemahaman terhadap laporan keuangan terkhusus akuntansi pemerintahan. Sebelum mampu menyusun laporan keuangan pemerintahan khususnya laporan keuangan desa, aparatur desa dituntut untuk mampu memahami Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan sendiri mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang memuat pernyataan-pernyataan Pelaporan Keuangan di instansi pemerintahan. Mengacu pada standar yang tersebut, Laporan keuangan pemerintah desa tersusun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pemahaman atas Standar Akuntansi Pemerintahan ini adalah upaya untuk memahami, menaksirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu yang dipelajarinya dengan cara tersendiri. Menurut Maekasari, dkk (2014), sumber daya manusia merupakan aspek yang harus diperhatikan karena sumber daya manusia lah yang berpengaruh dan memiliki nilai tinggi dalam suatu instansi berdasar kemampuan, keterampilan dan pengetahuan.

Dalam penelitian sebelumnya, Maekasari, dkk (2014), Diani (2014) menyatakan adanya pengaruh yang kuat dan signifikan yang positif antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan yang dihasilkan. Udiyanti, dkk (2014) juga dalam penelitiannya menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan Krisna Dewi (2014) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan atas pemahaman akuntansi keuangan daerah secara parsial. Dalam penelitian lain, Nisa (2016) membenarkan adanya pengaruh signifikan dan positif dari pemahaman standar akuntansi

pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Begitu pula Kartika dan Suhardjo (2013) yang berpendapat bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN APARATUR DESA (X1)  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA (Y)

Luh Sukriani, dkk (2018:94), Susma Devi (2017) , Kasim (2015:98),  
Trisnawati dan Wiratmaja (2018), Udiyanti, dkk (2014)

TINGKAT PENDIDIKAN APARATUR  
DESA

Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Sikula  
(2016), Notoatmojo (2003)

INDIKATOR TINGKAT PENDIDIKAN:

1. **Jenjang Pendidikan** : Undang-Undang  
No.20 Tahun 2003
2. **Kesesuaian Jurusan** : Undang-Undang  
No.20 Tahun 2003

PEMAHAMAN AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN

PMK No.238 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2,  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

INDIKATOR PEMAHAMAN AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN :

1. **Tujuan Pelaporan Keuangan** : Peraturan  
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP  
Nomor 1
2. **Tanggung jawab Pelaporan** : Peraturan  
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP  
Nomor 01
3. **Komponen Laporan Keuangan** : Peraturan  
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP  
Nomor 01
4. **Identifikasi Laporan Keuangan** :  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  
2010, PSAP Nomor 01
5. **Periode Pelaporan** : Peraturan Pemerintah  
Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 01

KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN DESA

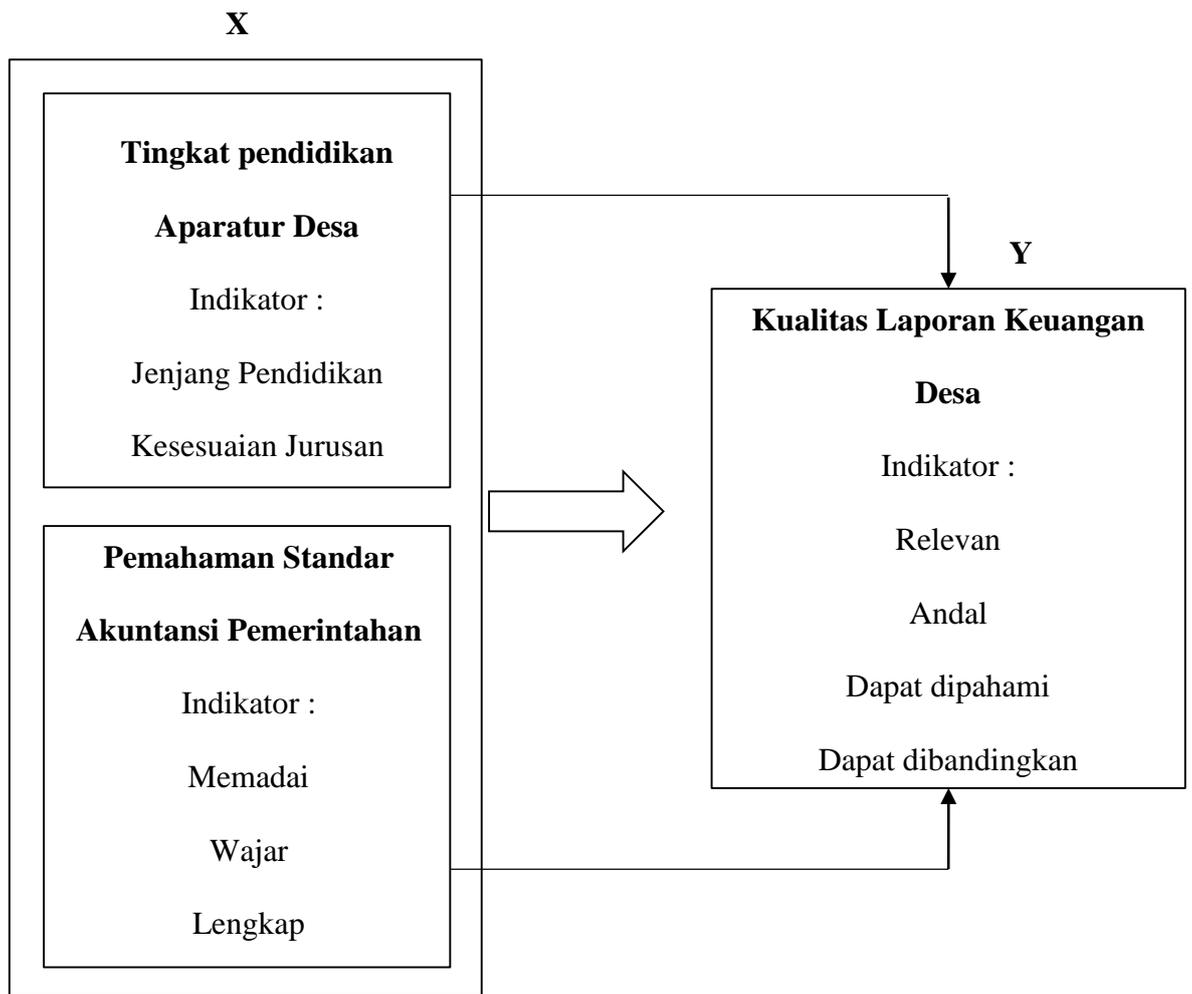
Lalit dan Baladji (2010:1),  
Charantimath (2011:196),  
Undang-Undang No. 6 Tahun  
2014

INDIKATOR KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN DESA

1. **Relevan** : Peraturan Pemerintah  
Nomor 71 Tahun 2010
2. **Andal** : Peraturan Pemerintah  
Nomor 71 Tahun 2010,
3. **Dapat Dibandingkan** : Peraturan  
Pemerintah No.71 Tahun 2010
4. **Dapat Dipahami** : Peraturan  
Pemerintah No.71 Tahun 2010

PENGARUH PEMAHAMAN  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

M. Sari , dkk (2014), Dewi (2014),  
Udiyanti, dkk (2014)



Keterangan :

- : berpengaruh secara parsial
- ⇨ : berpengaruh secara simultan

**Gambar 2.2**

**Paradigma Penelitian**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data**

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh dari Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa secara parsial

H2 : Terdapat pengaruh dari Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa secara simultan

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah objek yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014:4) yang dimaksud dengan objek penelitian adalah sasaran secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tentang suatu hal objektif, valid, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu). Dalam penelitian ini, objek yang diambil adalah Tingkat Pendidikan Aparatur Desa, Pemahaman Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas Laporan Keuangan Desa.

##### **3.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

###### **3.1.1.1 Sejarah Singkat**

Kecamatan Ngamprah berasal dari salah satu nama desa yang ada di Kecamatan Ngamprah, yaitu Desa Ngamprah. Kantor yang saat ini dijadikan Kantor Kecamatan Ngamprah pada awalnya adalah Kantor Desa Ngamprah. Nama Ngamprah secara etimologis berasal dari Amprah yang berarti punya keinginan kemudian diberi awalan “NG”, menjadi Ngamprah yang berarti punya keinginan untuk maju dan mensejajarkan diri bahkan ingin lebih maju dari Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Kecamatan Ngamprah berdiri sejak tahun 1976 menjadi Kamantren atau perwakilan Kecamatan Padalarang yang dipimpin oleh seorang Mantri Polisi bernama Sukardi. Pada saat itu, kecamatan Ngamprah memiliki 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Ngamprah, Desa Cimanggu, Desa Bojongkoneng, Desa Cilame, Desa Cimareme, Desa Tanimulya dan Desa Ciharashas (sekarang desa Margajaya).

Sejak bulan Nopember 1980 Kecamatan Ngamprah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat H. Aang Khunaefi menjadi Kecamatan yang mandiri terpisah dari Kecamatan Padalarang. Sejak masa kepemimpinan 1980-an Kecamatan Ngamprah sudah mengalami beberapa kali pergantian camat. Diantaranya Camat yang pertama adalah Bapak Rusamsi, BA (1980-1983), Bapak Effendi Saymbas (1983-1987), Bapak R. Soebandrio, SH (1987-1988), Bapak Sunarya Erawan (1988-1992), Bapak Drs. Ruchijat tahun (1992-1995), Bapak Drs. Edin Hendradin, M.Si (1995-2001), Bapak Drs. Wachdan Yustiana (2001-2002), Bapak Drs. Irwan Surya (2002-2003), Bapak Drs. Nusadah Yusuf (2003-2004), Bapak Drs. H. Wawan Herawan, M.Si (2004-2009), Bapak Drs. Enyek Rasnyah M.Ilyas, M.Si (2009-2011), Drs. Kusnindar (2011-2013), Bapak H. Endang Rachmat, SH, M.Si (2013 s.d. sekarang).

Adapun dibawah ini merupakan nama-nama desa di kecamatan Ngamprah antara lain sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**

**Nama-Nama Desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat**

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Alamat Kantor</b>
1	Desa Ngamprah	Jl. Ngamprah, Desa Ngamprah, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat
2	Desa Sukatani	Jl. Tanjakan Sukatani, Desa Sukatani, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat
3	Desa Mekarsari	Jl. Cibatukupa Cikupa, Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat
4	Desa Bojongkoneng	Jl. Desa Bojongkoneng No. 03, Desa Bojongkoneng, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat

5	Desa Gadobangkong	Jl. Raya Gadobangkong No.30, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat
6	Desa Cimareme	Jl. Caringin No. 314, Desa Cimareme, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat
7	Desa Margajaya	Jl. Pamagersari, Desa Margajaya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat
8	Desa Cimanggu	Jl. Desa Cimanggu, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat
9	Desa Cilame	Jl. Cibatukupa Cikupa, Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat
10	Desa Tanimulya	Jl. Somawinata No. 01, Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat

Sumber : [bandungbaratkab.go.id](http://bandungbaratkab.go.id)

### 3.1.1.2 Visi dan Misi

#### 1. Visi

Kecamatan Ngamprah memiliki visi sebagai berikut :

“Membangun Masyarakat Yang Cerdas Agamis Berbasis Pada Perkembangan Lingkungan Yang Natural/ Alami Terpadu Dan Inovatif Dengan Mempertimbangkan Kultur (Adat) Budaya Lokal Yang Hidup Dalam Masyarakat.”

#### 2. Misi

Adapun misi kecamatan Ngamprah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif, efisien dan ekonomis, yang berbasis pada system penganggaran yang pro publik.

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak cerdas, sehat dan berdaya saing.
- 3) Memberdayakan perekonomian desa berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agrowisata dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- 4) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
- 6) Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

### **3.1.1.3 Struktur Organisasi**

Susunan struktur organisasi di kecamatan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat :
  1. Subbagian Penyusunan Program
  2. Subbagian Kepegawaian dan Umum
  3. Subbagian Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Ekonomi dan Pendapatan Potensi Desa
- g. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum, dan



### 3.2.1 Metode yang digunakan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif menggunakan teknik survei.

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:111) pendekatan deskriptif sering digunakan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi. Pendekatan ini melibatkan proses pengumpulan data secara kuantitatif seperti tingkat kepuasan, jumlah produksi, jumlah penjualan atau data demografi. Meski begitu pendekatan deskriptif tetap memerlukan pengumpulan informasi secara kualitatif.

Pendekatan deskriptif bertujuan mengumpulkan data secara detail dan mendalam serta aktual. Metode deskriptif akan mengamati mulai dari gejala-gejala yang timbul tentang kondisi yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2014:53) pengertian metode deskriptif adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menganalisis Tingkat Pendidikan Aparatur Desa (X1), Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2) dan Kualitas Laporan Keuangan Desa (Y). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga data dari masalah tersebut dapat dikumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan teori yang telah dipelajari sebelumnya.

Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiyono (2014:55) adalah penelitian verifikatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, juga digunakan untuk menguji kebenaran atas hipotesis yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai variabel yang timbul. Dari segala kondisi diatas, metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

Terdapat lebih dari satu variabel bebas yang akan diuji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan analisis regresi linier berganda.

Secara fungsional penelitian ini memiliki tiga variabel, yaitu Tingkat Pendidikan Aparatur Desa (X1), Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2), terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Y). Menurut Sugiyono formulasi analisis Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan Desa)

a = Bilangan Konstanta

b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub> = Koefisien arah regresi

X<sub>1</sub> = Variabel bebas (Tingkat Pendidikan Aparatur Desa)

X<sub>2</sub> = Variabel bebas (Pemahaman Akuntansi Pemerintahan)

### **3.2.2 Definisi Variabel dan Operasional Variabel Penelitian**

#### **3.2.2.1 Definisi Variabel**

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:77) variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai yang dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Variabel dapat bersifat diskrit misalnya pria/wanita atau kontinu misalnya usia seseorang.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengukuran terhadap variabel menggunakan instrumen penelitian. Kemudian setelahnya penulis melanjutkan analisis untuk mengetahui pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya.

#### **1) Variabel Bebas**

Sekaran dan Bougie (2017:79) yang dimaksud dengan variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Jika terdapat variabel bebas, maka pastilah terdapat variabel terikat. Begitu pula jika variabel bebas mengalami kenaikan, maka variabel terikat juga terpengaruhi kenaikan atau penurunannya. Dalam artian, variabel terikat terbentuk akibat adanya variabel bebas.

Menurut Sugiyono (2017:39) yang dimaksud dengan variabel bebas (*independen*) adalah :

"Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".

## 2) Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent* variabel) merupakan variabel utama dalam penelitian. Melalui analisis variabel ini, maka terdapat kemungkinan untuk menemukan jawaban atau solusi dari masalah tersebut (Sekaran dan Bougie, 2017:77).

Sugiyono (2017:39) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan variabel terikat (*dependent* variabel) adalah sebagai berikut variabel ini sering disebut dengan variabel *output*, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

### 3.2.2.2 Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, operasional variabel ini digunakan pula dalam menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar.

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, maka dibuatlah operasional variabel yang berhubungan dengan variabel. Adapun sebagai berikut:

**Tabel 3.2****Operasional Variabel X1****Variabel Independen : Tingkat Pendidikan Aparatur Desa**

<b>Variabel</b>	<b>Konsep Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>	<b>No. Kuisisioner</b>
<b>Tingkat Pendidikan Aparatur Desa (X1)</b>	Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.	Menurut UU Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 :		
		1. Jenjang Pendidikan	Ordinal	1-3
		2. Kesesuaian Jurusan	Ordinal	4-5

**Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003**

**Tabel 3.3**

**Operasional Variabel X2**

**Variabel Independen: Pemahaman Akuntansi Pemerintahan**

<b>Variabel</b>	<b>Konsep Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>	<b>No. Kuesioner</b>
<b>Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2)</b>	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman berasal dari kata dasar paham yang artinya pengetahuan banyak dan mengerti dengan benar. Pemahaman sendiri memiliki arti proses atau perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu. Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menaksirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang	Indikator Pemahaman Akuntansi Sektor Publik berdasar PSAP Nomor 01 :		
		1. Tujuan Pelaporan Keuangan	Ordinal	1
		2. Tanggung jawab pelaporan	Ordinal	2
		3. Komponen Laporan Keuangan	Ordinal	3
		4. Identifikasi Laporan Keuangan	Ordinal	4
5. Periode Pelaporan	Ordinal	5		

	diterimanya. Dalam hal ini pemahaman merunut pada akuntansi pemerintahan			
--	--	--	--	--

Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia

Tabel 3.4

Operasional Variabel Y

Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Desa

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	No. Kuesioner
<b>Kualitas Laporan Keuangan Desa (Y)</b>	Kualitas Laporan keuangan - ( <i>financial statement</i> ) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta	Indikator Kualitas Laporan Keuangan :		
		1. Relevan	Ordinal	1-4
		2. Andal	Ordinal	5-6
		3. Dapat dibanding kan	Ordinal	7
		4. Dapat dipahami	Ordinal	8

	laba dan ruginya. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi.			
--	---	--	--	--

Sumber : Puspitawati dan Anggadini (2014) dan Standar Akuntansi

### Pemerintahan (SAP)

### 3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

#### 3.2.3.1 Populasi

Dalam penelitian yang harus diperhatikan adalah populasi yang diteliti. Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan subjek yang diteliti. Tidak hanya meliputi orang, jumlah atau benda-benda yang diteliti, namun berupa karakteristik populasi.

Menurut Sugiyono (2017:80) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh *staff* aparatur desa pada Kantor Desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat baik wanita maupun pria. Adapun populasinya terdiri atas *staff* aparatur desa di Kantor Desa Gadobangkong, Kantor Desa Sukatani, Kantor Desa Tanimulya, Kantor Desa Ngamprah, Kantor Desa Cilame, Kantor Desa Cimareme, Kantor Desa Margajaya, Kantor Desa Pakuhaji, Kantor Desa Cimanggu, Kantor Desa Mekarsari, dan Kantor Desa Bojongkoneng. Total populasi yang ada di 11 Kantor Desa di Kecamatan Ngamprah ini berjumlah 127 orang.

### **3.2.3.2 Sampel**

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel penelitian adalah sebagai berikut sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Sampel yang diambil harus mampu mewakili keseluruhan populasi. Ukuran sampel dapat di ambil minimal 30 subjek.

Menurut Sugiyono terdapat dua teknik sampling utama yaitu *probability sampling* dan *Nonprobability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2017:82). Sedangkan *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2017:84).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling *Nonprobability sampling* yakni *sampling purposive*. Yang dimaksud dengan *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:85). Pertimbangan penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Kecamatan Ngamprah berangkat pada fenomena yang ditemukan penulis mengenai sejumlah desa di Kabupaten Bandung Barat yang masih memiliki kualitas laporan keuangan yang kurang baik. Masih mengandung kesalahan dalam pelaporan realisasi anggaran. Oleh karena itu, penulis memilih Kecamatan Ngamprah untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau tidak.

Sampel yang diambil dari populasi hanya *staff-staff* bagian keuangan yang langsung berhubungan dengan proses pembuatan laporan keuangan. Dari 11 desa yang ada di Kecamatan Ngamprah, peneliti hanya akan mengambil 3-5 responden dengan kriteria *staff* bagian keuangan/bendahara desa dari masing-masing kantor desa. Sehingga didapatkan sampel penelitian sebanyak 38 orang.

#### **3.2.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data akan menjadi aspek yang penting dalam sebuah penelitian. Pada tahap ini, jika informasi atau data yang dikumpulkan salah maka akan menghambat atau membuat penelitiannya menjadi lebih sulit. Untuk setiap penelitian tentu memerlukan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data yang dimaksud tidak boleh dilakukan sembarangan. Tujuan dilakukannya pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang valid dan dipercaya.

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang diperlukan untuk penelitian. Adapun berikut ini merupakan teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan ini berguna untuk mengetahui keadaan dan kondisi yang sebenarnya dari masalah yang ada. Biasanya data yang dihasilkan adalah data primer yakni data yang didapat langsung dalam proses penelitian. Adapun langkah-langkah dari teknik penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi. Terlebih dulu peneliti harus menentukan tempat penelitian kemudian melakukan survei pada tempat dan kegiatan yang dituju. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada Kantor Desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

b. Kuesioner, yaitu teknis yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pernyataan yang terkait dengan penelitian kepada responden. Bentuk pernyataan yang dimaksud adalah pernyataan yang memerlukan respon dan alternative respon yang ditentukan oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2017:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Jenis pengumpulan data dengan langkah ini meliputi berbagai data dan informasi dari data atau karya tulis yang sudah ada atau data yang tersedia sebelumnya. Biasanya data yang menggunakan teknik pengumpulan ini dihasilkan untuk memenuhi

kebutuhan teori atas penelitian yang dilakukan. Penelitian Kepustakaan ini dapat berupa membaca, mempelajari, menelaah dan mengkaji buku, jurnal, dan/ atau penelitian terdahulu.

### 3.2.5 Metode Pengujian Data

Terdapat dua syarat penting dalam kuesioner, yaitu keharusan sebuah angket untuk validitas dan reliabilitas. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang dibutuhkan serta mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti tersebut secara tepat.

#### 3.2.5.1 Pengujian Validitas

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:177) validitas didefinisikan sebagai berikut :

“validitas (*validity*) didefinisikan sebagai sejauh mana instrumen mengukur apa yang ingin diukur. Namun demikian, dalam konteks ini, validitas memiliki arti yang berbeda. Hal ini mengacu pada sejauh mana hasil penelitian secara akurat menunjukkan data yang dikumpulkan (validitas internal) dan dapat digeneralisasikan atau diganti ke konteks atau keadaan yang lain (validitas eksternal).”

Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antar skor item instrumen dengan skor ideal item. Koefisien korelasi kemudian dibandingkan dengan standar validasi yang berlaku. Menurut Sugiyono (2014:126) suatu sistem dapat dikatakan valid apabila koefisien korelasi memiliki nilai positif dengan besaran diatas 0.3. Adapun rumus koefisien korelasi berdasar *Pearson product moment* menurut Sugiyono (2013:183) sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2) - ((n\sum y^2 - (\sum y)^2))}}$$

Keterangan :

r : Koefisien Korelasi

$\sum xy$  : Jumlah perkalian variabel x dan y

$\sum x$  : Jumlah nilai variabel x

$\sum y$  : Jumlah nilai variabel y

$\sum x^2$  : Jumlah pangkat dua variabel x

$\sum y^2$  : Jumlah pangkat dua variabel y

n : Banyaknya *sample*

Pengukuran *Product Moment Pearson* dengan IBM SPSS versi 25.0. menggunakan taraf signifikansi 0,05. Adapun kriteria pengujian data sebagai berikut :

- a. Jika  $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ , maka instrumen dalam pernyataan memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total yang diperoleh sehingga data dapat dinyatakan valid.
- b. Jika  $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$ , maka instrumen dalam pernyataan tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total sehingga data dapat dinyatakan tidak valid.

Untuk mengetahui tingkat penilaian validitas dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

**Kriteria penilaian data pengujian validitas**

Kriteria	Validity
<i>Good</i>	0,50
<i>Acceptabel</i>	0,30
<i>Marginal</i>	0,20
<i>Poor</i>	0,10

**Sumber : Sugiyono (2013:252)**

### 3.2.5.2 Pengujian Reliabilitas

Dalam Sekaran dan Bougie (2017:39) dinyatakan sebagai berikut :

“Reliabilitas (*reliability*) suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (tanpa kesalahan) dan karena itu menjamin konsistensi pengukuran di sepanjang waktu serta di berbagai poin ppada instrumen tersebut. Dengan kata lain, reliabilitas suatu ukuran merupakan indikator stabilitas dalam konsistensi di mana instrumen tersebut mengukur konsep serta nilai kesesuaian suatu ukuran.”

Rumus yang digunakan untuk melihat pengujian reliabilitas menurut Ghozali (2012:47) dalam Dewanty (2018) adalah sebagai berikut :

$$a = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ \frac{\sum S_j^2}{S_x^2} \right]$$

Keterangan :

a : Nilai reliabilitas

k : Banyaknya butir pertanyaan

$\sum S_j^2$  : Jumlah varians butir

$\sum S_x^2$  : Jumlah varians total

Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai alpha lebih dari 0,6 (Ghozali, 2010:64)

**Tabel 3.6**

#### **Nilai dan Tingkat Reliabilitas**

<b>Kriteria</b>	<b>Reliability</b>
Sangat Reliabel	0,81-1,00
Reliabel	0,61-0,80
Cukup Reliabel	0,41-0,60
Kurang Reliabel	0,21-0,40
Tidak Reliabel	0,00-0,20

**Sumber : Sugiyono (2016:254)**

### 3.2.6 *Interval Successive Method* (Metode Suksesif Interval)

Sebelum melakukan kegiatan analisis korelasi dan regresi, penelitian yang menggunakan skala ordinal perlu diubah menjadi skala interval. Sedangkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner memiliki skala ordinal. Maka dari itu digunakan metode *successive interval* (MSI) guna menkonversi atau mengubah data dengan skala ordinal menjadi data berskala interval. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Menghitung distribusi frekuensi (f) setiap pilihan jawaban responden pada setiap pertanyaan atau pernyataan.
2. Melakukan perhitungan proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban berdasarkan distribusi frekuensi.
3. Menghitung nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pernyataan dan setiap pilihan jawaban.
4. Menentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh dengan menggunakan tabel tinggi densitas.
5. Menghitung *scale value* (nilai interval rata-rata) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut :

*Scale Value*

$$= \frac{(Density\ at\ Lower\ Limit) - (Density\ at\ Upper\ Limit)}{(Area\ Under\ upper\ Limit) - (Area\ Under\ Lower\ Limit)}$$

Keterangan :

*Density at lower limit* = Kepadatan batas bawah

*Density at upper limit* = Kepadatan batas atas

*Area under upper limit* = Daerah dibatas atas

*Area under lower limit* = Daerah dibatas bawah

Dalam pengolahan data ini, peneliti menggunakan perhitungan persentase dan skor rata-rata jawaban responden dalam kuesioner menggunakan rumus :

$$\% \text{ Skor total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Sedangkan skor ideal merupakan skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tinggi. Adapun kriteria skor yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

**Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden**

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	0,00% - 19%	Tidak Baik
2	20% - 39%	Kurang Baik
3	40% - 59%	Cukup
4	60% - 79%	Baik
5	80% - 100%	Sangat Baik

**Sumber : (Sugiyono, 2013:138)**

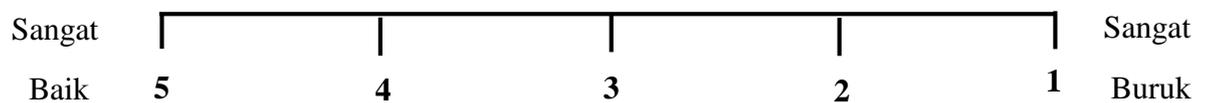
**3.2.7 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis**

**3.2.7.1 Analisis data**

Analisis data adalah suatu proses pengolahan data menjadi informasi baru yang berguna, agar karakteristik data tersebut menjadi mudah dimengerti khususnya dalam kaitannya dengan penelitian. Data mentah yang telah terhimpun di lapangan akan dibandingkan dengan data secara kepustakaan, sebelum akhirnya diambil kesimpulan. Data yang dianalisis tentu harus berkaitan dengan variabel-variabel.

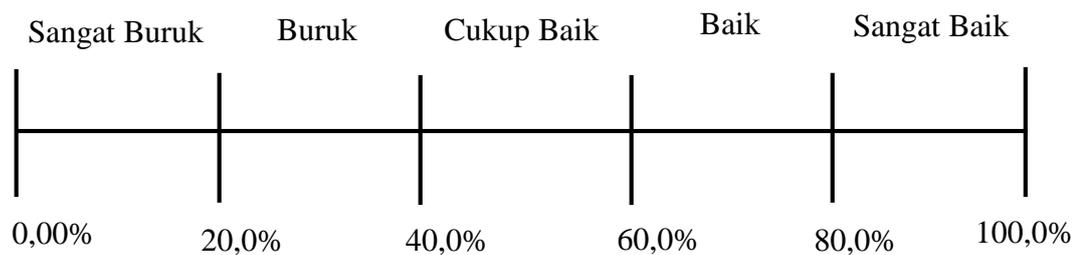
Untuk menilai variabel X dan Y maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata dari masing-masing variabel. Nilai dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan data yang ada dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Setelah diperoleh nilai rata-rata dari variabel, maka nilai tersebut akan dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya berdasar nilai tertinggi dan terendah dari hasil kuesioner. Dalam menentukan kriteria yang diperlukan adalah dengan mengalikan nilai terendah (1) dan nilai tertinggi (5) dengan menggunakan *skala semantic defferensial*.

Sugiyono (2017:164) mengemukakan bahwa skala *semantic defferensial* digunakan untuk mengukur sikap yang bentuknya tidak menggunakan pilihan ganda maupun *checklist*, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban “Sangat Positif” terletak disebelah kanan dan jawaban “Sangat Negatif” berada disebelah kiri garis atau sebaliknya.



**Gambar 3.2**  
**Contoh Skala Semantic Defferensial**

Sehingga berdasar perhitungan di atas, dapat diketahui tingkat jawaban responden pada setiap item pertanyaan dengan tafsiran daerah sebagai berikut :



**Gambar 3.3**

**Garis Kontinum**

**3.2.7.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi linear, yaitu pengujian kualitas data agar diketahui keabsahan data serta menghindari adanya penafsiran bias. Terdapat beberapa jenis pengujian yang harus dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dapat mewakili atau mendekati keadaan yang ada. Jenis uji asumsi klasik ini diantaranya uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi.

**1. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel terikat maupun variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan uji statistik. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. (Ghozali, 2018:161)

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan cara melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2018:163)

Adapun dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2018:163) adalah sebagai berikut :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

## **2. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018:137). Situasi heteroskedastisitas dapat menyebabkan penaksiran koefisien regresi menjadi tidak efisien, kurang atau bahkan melebihi hasil semestinya. Oleh karena itu, situasi heteroskedastisitas harus dihilangkan dari model regresi agar hasil penelitian tidak menyesatkan.

Untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas digunakan uji *rank spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*). Jika nilai koefisien korelasi antara variabel bebas dan nilai absolut dari residual signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat situasi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual tidak signifikan, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung kondisi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137)

Menurut Ghozali (2018:138), dasar dari analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi kondisi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi kondisi heteroskedastisitas.

### 3. Uji Multikolinearitas

Menurut Danang Sunyoto (2016:87) dalam Hakim (2017) menjelaskan uji multikolinearitas sebagai berikut:

"Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel ( $X_1, 2, 3, \dots, n$ ) di mana akan diukur keeratatan hubungan antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi ( $r$ )".

Uji multikolinieritas ini bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi dengan uji multikolinieritas dapat dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Diketahui jika variabel bebasnya saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak orthogonal. Yang dimaksud dengan variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebasnya sama dengan nol.

Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF).

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

$R_i^2$  adalah determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu variabel bebas  $X_1$  terhadap variabel bebas lain. Jika nilai VIF melebihi nilai 10, maka diantara variabel bebas terdapat gejala multikolinieritas.

Multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena  $VIF = 1/Tolerance$ . Nilai cutoff yang umum dipakai menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai tolerance  $\leq 0,10$  atau sama dengan  $VIF \geq 10$ .

### **3.2.7.3 Rancangan Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan aparatur desa (X1), pemahaman akuntansi pemerintahan (X2), kualitas laporan keuangan desa (Y). Apabila memang terdapat hubungan antara variabel independen seberapa besar dan bagaimana hubungan dari kedua variabel tersebut, yaitu hipotesis tidak lain dari jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris.

Maka dari itu diajukan beberapa uji hipotesis atas jawaban sementara dari variabel yang akan diuji kebenarannya. Rumusan hipotesisnya meliputi sebagai berikut:

#### **a. Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Menurut Moh. Nazir (2011:463) menyatakan bahwa jika parameter dari suatu hubungan fungsional antara satu variabel dependen atau lebih dari satu variabel ingin diestimasi, maka analisis regresi yang dikerjakan berkenaan dengan regresi berganda (*Multiple regression*)”.

Secara fungsional persamaan regresi ketiga variabel yang diteliti yaitu Tingkat Pendidikan Aparatur Desa (X1), Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Y). Menurut Sugiyono (2014:284) inilah rumus yang dihasilkan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan Desa)

a = Bilangan Konstanta

b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub> = Koefisien arah regresi

X<sub>1</sub> = Variabel bebas (Tingkat Pendidikan Aparatur Desa)

X<sub>2</sub> = Variabel bebas (Pemahaman Akuntansi Pemerintahan)

#### **b. Analisis Koefisien Korelasi**

Menurut Singgih Santoso (2010:141), Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mempelajari apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih, sedang analisis regresi memprediksi seberapa jauh pengaruh tersebut. Secara spesifik, tujuan analisis korelasi adalah ingin mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan, dan jika terdapat hubungan, bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Secara teoritis, dua variabel dapat sama sekali tidak berhubungan ( $r=0$ ), berhubungan secara sempurna ( $r=1$ ), atau antara kedua

angka tersebut. Arah korelasi juga dapat positif (berhubungan searah) atau negatif (berhubungan berlawanan arah).

### 1. Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi parsial (*Partial Correlation*) digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol). Serta digunakan untuk mengetahui kuat lemahnya Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa pada kantor desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Jenis korelasi yang bias digunakan pada hubungan variabel linier adalah *Pearson Product Moment* (r) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan  
 $r_{xy}$  : Koefisien validitas  
 N : Banyaknya subjek  
 X : Nilai pembanding  
 Y : Nilai dari instrument yang akan dicari validitasnya.

**Gambar 3.4**

### Gambar Korelasi Parsial

Korelasi *Pearson Product Moment* (PPM) dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ + 1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif sempurna, r = 0 artinya tidak ada korelasi, dan r = 1 berarti korelasi sangat kuat.

### 2. Analisis Korelasi Berganda

Korelasi Ganda (*multiple correlation*) merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas (X1, X2) serta satu variabel terikat (Y). Apabila qperumusan

masalahnya terdiri dari tiga masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana, oleh karena itu berikut ini hanya akan dikemukakan cara perhitungan ganda antara X1, dan X2 dengan Y.

$$R_{X_1X_2Y} = \sqrt{\frac{r^2_{X_1Y} + r^2_{X_2Y} - 2.r_{X_1Y} . r_{X_2Y} . r_{X_1X_2}}{1-r^2_{X_1X_2}}}$$

Keterangan:

$R_{y_{x_1x_2}}$  = Korelasi antar variabel X1 dan X2 secara bersamaan dengan variabel Y

$R_{yx_1}$  = Korelasi *product moment* antara X1 dengan Y

$R_{yx_2}$  = Korelasi *product moment* antara X2 dengan Y

$R_{yx_1x_2}$  = Korelasi *product moment* antara X1 dengan X2

Jenis korelasi yang biasa digunakan adalah korelasi *pearson product moment* (r) dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2) - ((n\sum y^2 - (\sum y)^2))}}$$

Keterangan :

rx<sub>y</sub> : Koefisien korelasi

X : variabel independen

Y : variabel dependen

Artinya jika nilai r = -1 maka korelasi bersifat negatif sempurna. Jika r = 0 maka tidak terdapat hubungan korelasi. Namun jika r = 1 maka korelasi bersifat sangat kuat.

**Tabel 3.8**

**Pedoman pemberian interpretasi terhadap koefisien korelasi**

<b>Koefisien Korelasi</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

**Sumber : Sugiyono (2014:184)**

**3.2.7.4 Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t-Parsial)**

Uji t dilakukan untuk mengukur secara parsial masing-masing variabel. Dimana variabel akan diuji seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus uji t adalah sebagai berikut :

$$H_0 : r = 0 \text{ atau } H_a : r \neq 0$$

Keterangan :

$H_0$  : Format hipotesis awal (Hipotesis nol)

$H_a$  : Format hipotesis *alternative*

1. Merumuskan hipotesis statistik

a. Variabel Tingkat Pendidikan Aparatur Desa (X1)

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya Tingkat Pendidikan Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya Tingkat Pendidikan Aparatur Desa berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

b. Variabel Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2)

$H_0 : \beta_2 = 0$ , artinya Pemahaman Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

$H_a : \beta_2 \neq 0$ , artinya Pemahaman Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ). Artinya kemungkinan besar hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai tingkat probabilitas atau toleransi 5%. Melakukan pengujian statistik parsial dapat dilakukan dengan mencari nilai  $t_{hitung}$  untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang diteliti signifikan atau tidak.

Di bawah ini merupakan rumus uji signifikansi korelasi :

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

$T_{hitung}$  = nilai  $t_{hitung}$  yang selanjutnya dikonsultasikan dengan  $t_{tabel}$

$n$  = jumlah sampel

$r$  = nilai koefisien parsial yang ditemukan

3. Membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  untuk menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis.

a. Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ , dan  $t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima (signifikan).

b. Jika  $t_{hitung} < -t_{tabel}$ , dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak (tidak signifikan).

### 3.2.7.5 Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan (bersamaan) terhadap variabel terikat. Adapun bentuk pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$ , artinya Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

$H_a : \beta_1, \beta_2 \neq 0$ , artinya Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

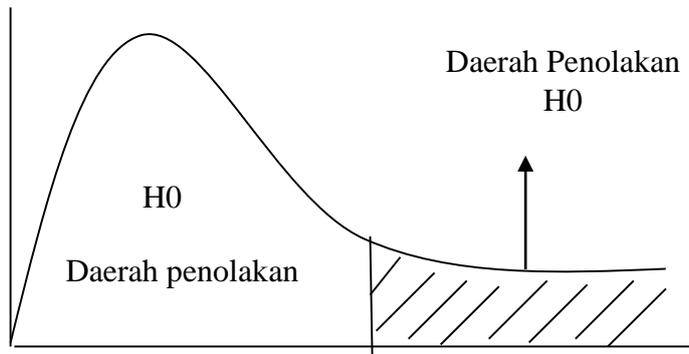
Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F ini disebut juga dengan *Analysis of Variance* (ANOVA). Uji F bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan/pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan.

Uji F atau disebut dengan Anova ini memiliki dua cara yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pengujian yakni dengan membandingkan tingkat signifikan atau dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika pengujian didasarkan pada perbandingan tingkat signifikan, ketika tingkat signifikan  $< 0.05$  maka hipotesis diterima (berpengaruh). Namun jika nilai tingkat signifikan  $> 0.05$  maka hipotesis tersebut ditolak (tidak berpengaruh).

Selain menggunakan perbandingan tingkat signifikan, uji F bisa dilakukan berdasarkan perbandingan  $f_{hitung}$  dengan  $f_{tabel}$ . Adapun ketentuan dalam cara ini adalah sebagai berikut :

- a. Jika  $f_{hitung} > f_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (berpengaruh).

- b. Jika  $f_{hitung} < f_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak berpengaruh).



**Gambar 3.5**

**Daerah penolakan dan penerimaan  $H_0$  Uji F pihak kanan.**

#### **3.2.7.6 Analisis Koefisien Determinasi**

Analisis koefisien determinasi berguna untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi dinyatakan dalam persentase (%). Adapun rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd : Koefisien determinasi

r : Korelasi *product moment*

Nilai koefisien korelasi memiliki kisaran antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai mendekati 1, maka pengaruh variabel independen semakin kuat terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, jika nilai koefisien mendekati 0, maka pengaruh variabel independen semakin lemah terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian**

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian, analisis serta pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa menggunakan perhitungan statistik dan pengujian hipotesis. Hal ini berguna untuk mengetahui gambaran setiap variabel yang diteliti dan analisis berganda untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Dalam penelitian ini, kuesioner yang ditujukan kepada Bagian Keuangan dan Bendahara dari 11 Kantor Desa yang ada di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Namun pada pelaksanaannya, hanya 10 Desa yang mengizinkan adanya penelitian dan penyebaran kuesioner. Sehingga diperoleh total responden sebanyak 38 orang dari 10 Kantor Desa. Jumlah responden yang diperoleh tersebut meliputi seluruh Bagian/Staf Keuangan dan Bendahara Kantor Desa.

Berikut ini adalah data Kantor Desa yang menjadi responden bagi peneliti, antara lain :

**Tabel 4.1****Daftar Kantor Desa yang menjadi responden penelitian**

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Alamat Kantor</b>	<b>Kuesioner yang disebar</b>	<b>Kuesioner yang kembali</b>
1	Desa Ngamprah	Jl. Ngamprah, Desa Ngamprah, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat	5	5
2	Desa Sukatani	Jl. Tanjakan Sukatani, Desa Sukatani, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat	5	5
3	Desa Mekarsari	Jl. Cibatukupa Cikupa, Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat	5	5
4	Desa Bojongkoneng	Jl. Desa Bojongkoneng No. 03, Desa Bojongkoneng, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat	5	5
5	Desa Gadobangkong	Jl. Raya Gadobangkong No.30, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat	5	4
6	Desa Cimareme	Jl. Caringin No. 314, Desa Cimareme, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat	5	5
7	Desa Margajaya	Jl. Pamagersari, Desa Margajaya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat	5	3
8	Desa Cimanggu	Jl. Desa Cimanggu, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat	5	1
9	Desa Cilame	Jl. Cibatukupa Cikupa, Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat	5	1
10	Desa Tanimulya	Jl. Somawinata No. 01, Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat	5	4

**Sumber : Hasil Pengolahan Data**

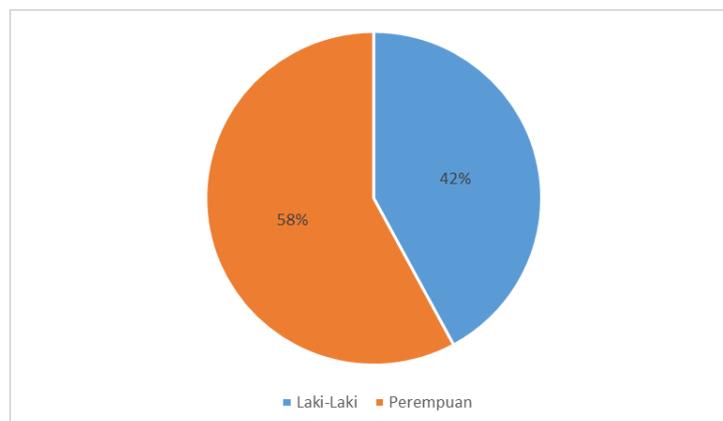
#### 4.1.1 Gambaran Umum Responden

Seperti yang telah dijelaskan di atas secara singkat, bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang telah diolah untuk dapat mengetahui sejauh mana pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner ke 10 Desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Dengan jumlah responden yang diharapkan minimal per Kantor Desa mengisi 5 kuesioner yang disiapkan oleh peneliti.

Pada pelaksanaannya, peneliti melampirkan masing-masing 5 kuesioner yang harus diisi oleh masing-masing responden. Dapat diketahui bahwa total keseluruhan kuesioner yang disebar oleh peneliti adalah sebanyak 50 buah. Sedangkan kuesioner yang kembali hanya sebanyak 38 buah.

Untuk menjelaskan identitas responden yang menjadi sampel penelitian, berikut adalah tabel yang mendeskripsikan profil responden. Deskripsi profil yang dimaksud meliputi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir yang dimiliki responden.

##### 4.1.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

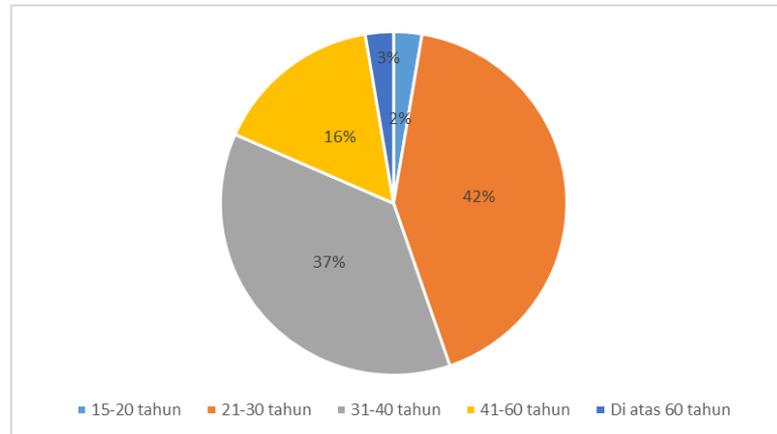


**Gambar 4.1 Profil Responden Berdasar Jenis Kelamin**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data**

Berdasar data gambar di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari total responden 38 orang, sebagian besar responden dari penelitian adalah perempuan sebanyak 22 orang dengan persentase 58%. Sedangkan data responden laki-laki sisanya sebanyak 16 orang dengan persentase 42%.

#### 4.1.1.2 Responden Berdasarkan Usia

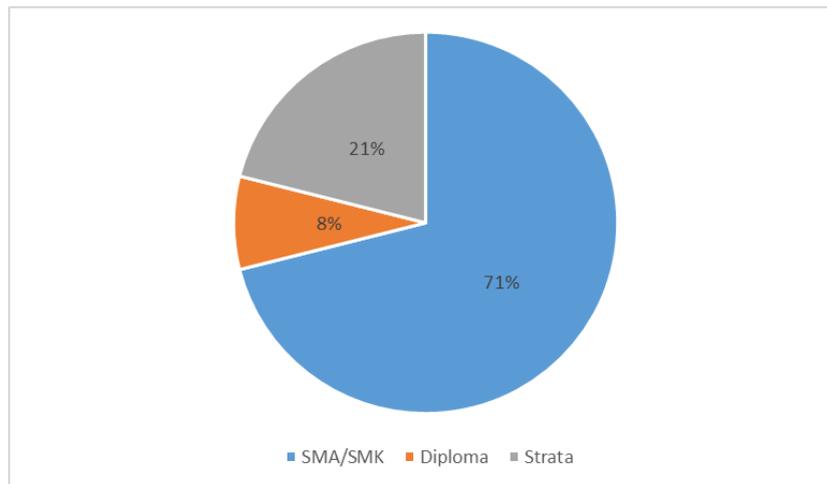


**Gambar 4.2 Profil Responden Berdasarkan Usia**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data**

Dilihat dari data gambar di atas, diketahui bahwa dari total responden 38 orang, responden yang berusia kisaran 15-20 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 2%, responden yang berusia kisaran 21-30 tahun sebanyak 16 orang dengan persentase 42%, responden yang berusia kisaran 31-40 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 37%, responden yang berusia kisaran 41-60 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 16%, dan responden yang memiliki usia di atas 60 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 3%.

#### 4.1.1.3 Responden Berdasarkan Pendidikan



**Gambar 4.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data**

Berdasar pada gambar di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari total responden sebanyak 38 orang, sebanyak 27 orang dengan persentase 71% memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA/SMK, 3 orang dengan persentase 8% memiliki latar belakang pendidikan terakhir Diploma, dan sisanya 8 orang dengan persentase 21% memiliki latar belakang pendidikan terakhir Strata-1.

#### 4.1.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Sebelum dilakukan analisis yang berkaitan dengan tujuan penelitian, data yang sudah diperoleh harus diuji terlebih dahulu. Adapun pengujian yang dilakukan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas yang berguna untuk mengukur ketepatan dan keandalan alat ukur yang digunakan pada penelitian ini. Pengukuran validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran mampu mengukur apa yang diukur. Sedangkan pengukuran reliabilitas dimaksudkan untuk menguji keandalan alat ukur penelitian yang digunakan sehingga dapat diandalkan tingkat kebenarannya.

#### 4.1.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur variabel atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji korelasi *Product Moment Pearson* menggunakan *software* SBM SPSS versi 25.0. Pengujian dilakukan dengan mengkorelasikan skor jawaban responden dari setiap item pernyataan. Nilai  $r_{tabel}$  untuk  $n = 38$  dan taraf signifikansi 0,05. Berikut di bawah ini merupakan hasil perhitungan  $t_{hitung}$  dan perbandingannya dengan  $t_{tabel}$  :

**Tabel 4.2**

#### **Uji Validitas Tingkat Pendidikan Aparatur Desa (X1)**

<b>Pernyataan</b>	<b>r tabel</b>	<b>r hitung</b>	<b>Keterangan</b>
X11	0,312	0,452	Valid
X12	0,312	0,602	Valid
X13	0,312	0,485	Valid
X14	0,312	0,769	Valid
X15	0,312	0,781	Valid

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan *software* SPSS versi 25.0.**

Dilihat berdasar tabel 4.2 di atas, hasil uji validitas menunjukan bahwa semua pernyataan dalam Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dinyatakan valid.

**Tabel 4.3**

#### **Uji Validitas Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2)**

<b>Pernyataan</b>	<b>r tabel</b>	<b>r hitung</b>	<b>Keterangan</b>
X11	0,312	0,411	Valid
X12	0,312	0,743	Valid
X13	0,312	0,754	Valid
X14	0,312	0,749	Valid
X15	0,312	0,636	Valid

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan *software* SPSS versi 25.0.**

Berdasar tabel 4.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam Pemahaman Akuntansi Pemerintahan juga valid.

**Tabel 4.4**

**Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Desa (Y)**

<b>Pernyataan</b>	<b>r tabel</b>	<b>r hitung</b>	<b>Keterangan</b>
Y11	0,312	0,766	Valid
Y12	0,312	0,712	Valid
Y13	0,312	0,823	Valid
Y14	0,312	0,827	Valid
Y15	0,312	0,737	Valid
Y16	0,312	0,848	Valid
Y17	0,312	0,857	Valid
Y18	0,312	0,497	Valid

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan *software* SPSS versi 25.0.**

Berdasar tabel 4.4 di atas, dapat disimpulkan pula bahwa pernyataan yang ada dalam Kualitas Laporan Keuangan Desa dinyatakan valid.

**4.1.2.2 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali:2018:45). Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabel menggunakan metode *Alpha Cronbach's* untuk menguji keandalan dari alat ukur.

Dengan menggunakan *software* SPSS versi 25.0. didapatkan hasil perhitungan uji reliabilitas sebagai berikut :

**Tabel 4.5**

**Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Pendidikan Aparatur Desa (X1)**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,602	,597	5

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS versi 25.0.**

Berdasar perhitungan menggunakan SPSS 25.0. dapat dilihat bahwa variabel Tingkat Pendidikan Aparatur Desa memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,602. Nilai itu lebih besar dibanding dengan 0.6 sebagai syarat tingkat reliabel suatu variabel. Maka seluruh pernyataan dalam variabel Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dinyatakan reliabel.

**Tabel 4.6**

**Uji Reliabilitas Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2)**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,679	,674	5

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS versi 25.0.**

Pengujian menggunakan SPSS 25.0. menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,679. Nilai itu lebih besar dibanding dengan 0.6 sebagai syarat tingkat reliabel suatu variabel. Maka seluruh pernyataan dalam Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dinyatakan reliabel.

**Tabel 4.7**

**Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Desa (Y)**

<b>Reliability Statistics</b>		
<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>Cronbach's Alpha Based on Standardized Items</b>	<b>N of Items</b>
,896	,894	8

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0.**

Melihat hasil pada tabel 4.7, Kualitas Laporan Keuangan Desa memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,896. Nilai itu masih lebih besar dengan 0,6 sebagai syarat variabel dinyatakan reliabel. Maka seluruh pernyataan dalam Kualitas Laporan Keuangan Desa dinyatakan sangat reliabel.

Berdasarkan seluruh hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keseluruhan pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini sudah teruji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Sehingga seluruh instrumen pernyataan layak untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa, Pemahaman Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat**

#### **4.2.1.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa di Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat**

Tingkat Pendidikan Aparatur Desa terdiri dari 5 pernyataan dengan 2 indikator utama. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif dan berdasar pendekatan distribusi frekuensi persentase dan persentase skor :

**Tabel 4.8**

**Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Pendidikan Aparatur Desa (X1)**

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase
		5	4	3	2	1			
Jenjang Pendidikan	X11	20	17	1	0	0	171	190	90,%
	X12	30	8	0	0	0	182	190	95,8%
	X13	18	17	3	0	0	167	190	87,9%
Kesesuaian Jurusan	X14	12	13	10	0	3	145	190	76,3%
	X15	13	12	8	1	4	143	190	75,3%
<b>Total</b>							<b>808</b>	<b>950</b>	<b>85,0%</b>

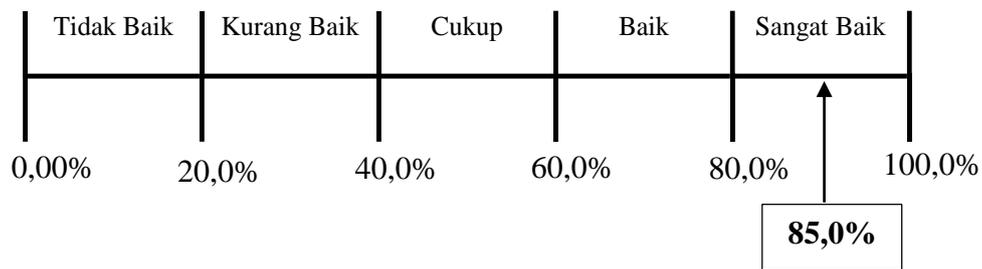
**Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner**

Perhitungan skor adalah sebagai berikut :

$$Skor\ Total = \frac{Skor\ Aktual}{Skor\ Ideal} \times 100\%$$

$$Skor\ Total = \frac{808}{950} \times 100\% = 85,0\%$$

Berdasarkan tabel 4.8 yang memberikan informasi mengenai rekapitulasi hasil perhitungan skor tanggapan responden terhadap 5 pernyataan mengenai Tingkat Pendidikan Aparatur Desa, diperoleh hasil interpretasi skor tanggapan responden dari Tingkat Pendidikan Aparatur Desa yang dimiliki oleh responden sebesar 808 dengan persentase 85,0%. Hasil tersebut dapat digambarkan melalui garis kontinum sebagai berikut :



**Gambar 4.4**

**Garis Kontinum Tingkat Pendidikan Aparatur Desa**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data**

Skor tanggapan responden yang diperoleh sebesar 85% dari total 5 pernyataan mengenai Tingkat Pendidikan Aparatur Desa. Skor ini berada di kategori “Sangat Baik” pada rentang antara 80%-100%. Hal ini mengungkapkan bahwa tanggapan responden mengenai Tingkat Pendidikan Aparatur Desa sangat baik.

**4.2.1.2 Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2) di Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Bandung Barat.**

Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 5 pernyataan dengan 5 indikator utama. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif dan berdasar pendekatan distribusi frekuensi persentase dan persentase skor :

**Tabel 4.9**

**Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Akuntansi Pemerintahan (X2)**

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase
		5	4	3	2	1			
Tujuan Laporan Keuangan	X21	20	17	1	0	0	171	190	90,0%
Tanggung Jawab Pelaporan	X22	18	13	7	0	0	163	190	85,8%
Komponen Laporan Keuangan	X23	18	17	2	0	1	165	190	86,8%

Identifikasi Laporan Keuangan	X24	13	17	6	1	1	154	190	81,1%
Periode Pelaporan	X25	19	8	10	1	0	159	190	83,7%
<b>Total</b>							<b>812</b>	<b>950</b>	<b>85,4%</b>

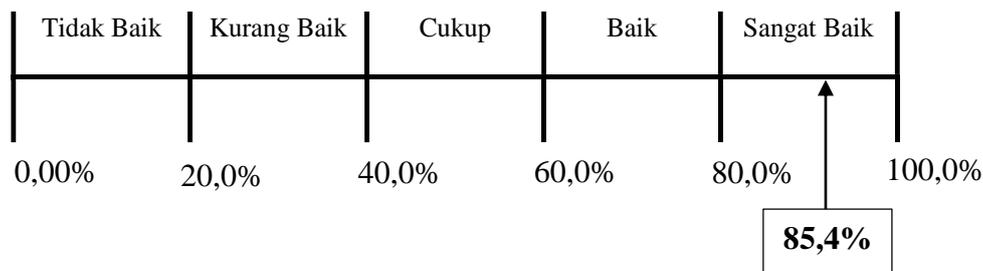
**Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner**

Perhitungan skor adalah sebagai berikut :

$$Skor\ Total = \frac{Skor\ Aktual}{Skor\ Ideal} \times 100\%$$

$$Skor\ Total = \frac{812}{950} \times 100\% = 85,4\%$$

Berdasarkan tabel 4.9 yang memberikan informasi mengenai rekapitulasi hasil perhitungan skor tanggapan responden terhadap 5 pernyataan mengenai Pemahaman Akuntansi Pemerintahan, diperoleh hasil interpretasi skor tanggapan responden dari Pemahaman Akuntansi Pemerintahan yang dimiliki oleh responden sebesar 812 dengan persentase 85,4%. Hasil tersebut dapat digambarkan melalui garis kontinum sebagai berikut :



**Gambar 4.5**

**Garis Kontinum Pemahaman Akuntansi Pemerintahan**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data**

Skor tanggapan responden yang diperoleh sebesar 85,4% dari total 5 pernyataan mengenai Pemahaman Akuntansi Pemerintahan. Skor ini berada di kategori “Sangat Baik” pada rentang antara 80%-100%. Hal ini mengungkapkan

bahwa tanggapan responden mengenai Pemahaman Akuntansi Pemerintahan sangat baik.

#### 4.2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Bandung Barat

Kualitas Laporan Keuangan Desa terdiri dari 8 pernyataan dengan 4 indikator utama. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif dan berdasar pendekatan distribusi frekuensi persentase dan persentase skor :

**Tabel 4.10**

#### **Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Desa (Y)**

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase
		5	4	3	2	1			
Relevan	Y11	18	17	2	1	0	157	190	82,6%
	Y12	20	18	0	0	0	172	190	90,5%
	Y13	16	16	4	2	0	160	190	84,2%
	Y14	19	16	3	0	0	168	190	88,4%
Andal	Y15	23	11	4	0	0	171	190	90,0%
	Y16	17	18	2	1	0	165	190	86,8%
Dapat Dibandingkan	Y17	16	19	3	0	0	165	190	86,8%
Dapat Dipahami	Y8	24	12	2	0	0	174	190	91,6%
<b>Total</b>							<b>1332</b>	<b>1520</b>	<b>87,6%</b>

**Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner**

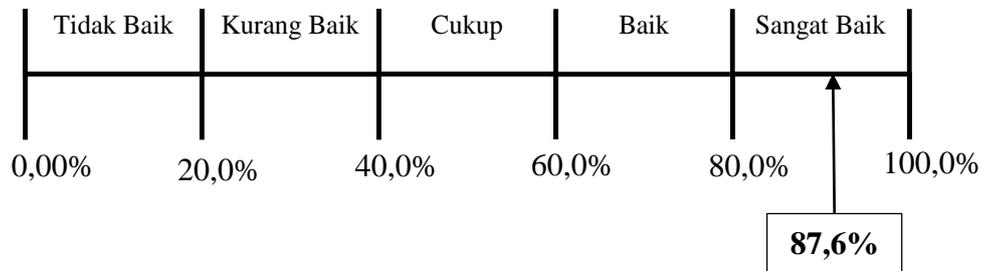
Perhitungan skor adalah sebagai berikut :

$$Skor\ Total = \frac{Skor\ Aktual}{Skor\ Ideal} \times 100\%$$

$$Skor\ Total = \frac{1332}{1520} \times 100\% = 87,6\%$$

Berdasarkan tabel 4.10 yang memberikan informasi mengenai rekapitulasi hasil perhitungan skor tanggapan responden terhadap 8 pernyataan mengenai Kualitas Laporan Keuangan Desa, diperoleh hasil interpretasi skor tanggapan

responden dari Kualitas Laporan Keuangan Desa yang dimiliki oleh responden sebesar 1332 dengan persentase 87,6%. Hasil tersebut dapat digambarkan melalui garis kontinum sebagai berikut :



**Gambar 4.6**

**Garis Kontinum Kualitas Laporan Keuangan Desa**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data**

Skor tanggapan responden yang diperoleh sebesar 87,6% dari total 8 pernyataan mengenai Kualitas Laporan Keuangan Desa. Skor ini berada di kategori “Sangat Baik” pada rentang antara 80%-100%. Hal ini mengungkapkan bahwa tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Desa sangat baik.

**4.2.2 Pengujian Hipotesis (Uji t)**

**4.2.2.1 Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji ini dilakukan untuk menggambarkan apakah data yang diolah normal atau tidak. Adapun hasil perhitungan uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *software* IBM SPSS versi 25.0 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 11**

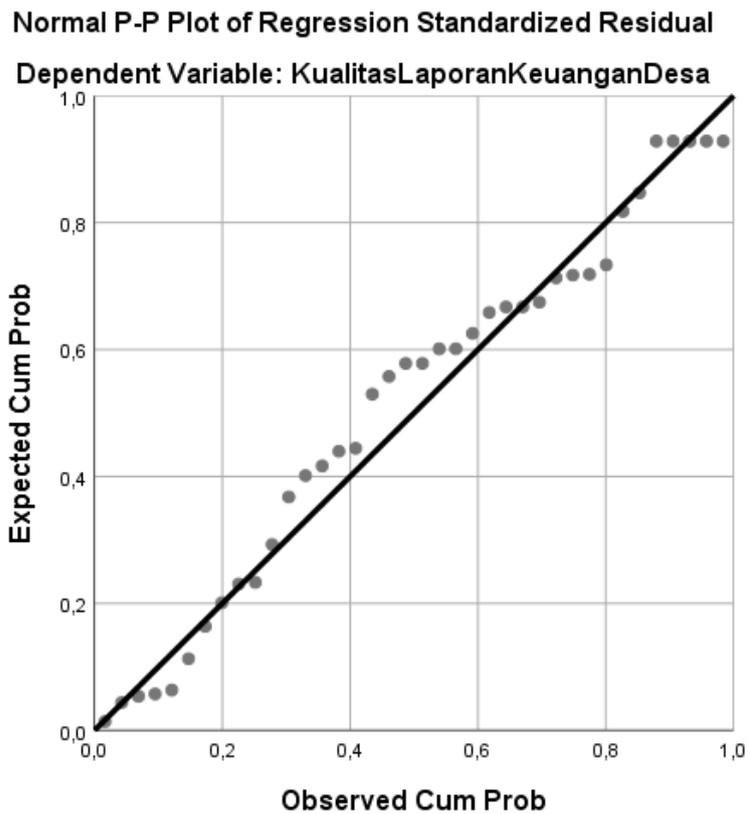
**Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,35861232
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,077
	Negative	-,112
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS versi 25.0.**

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi data tersebut sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual telah terdistribusi secara normal. Data dapat dikatakan signifikan ketika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka uji *Kolmogorov-Smirnov Test* tersebut menunjukkan tingkat normalitas data, karena  $0,200 > 0,05$ .

Selain menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov Test*, Uji normalitas dapat pula dilakukan dengan cara melihat grafik normal plot serta histogram dari residualnya. Berikut di bawah ini hasil uji normalitas dengan menggunakan *probability plot* dan grafik histogram yang didapat dari pengujian menggunakan SPSS versi 25.0 :



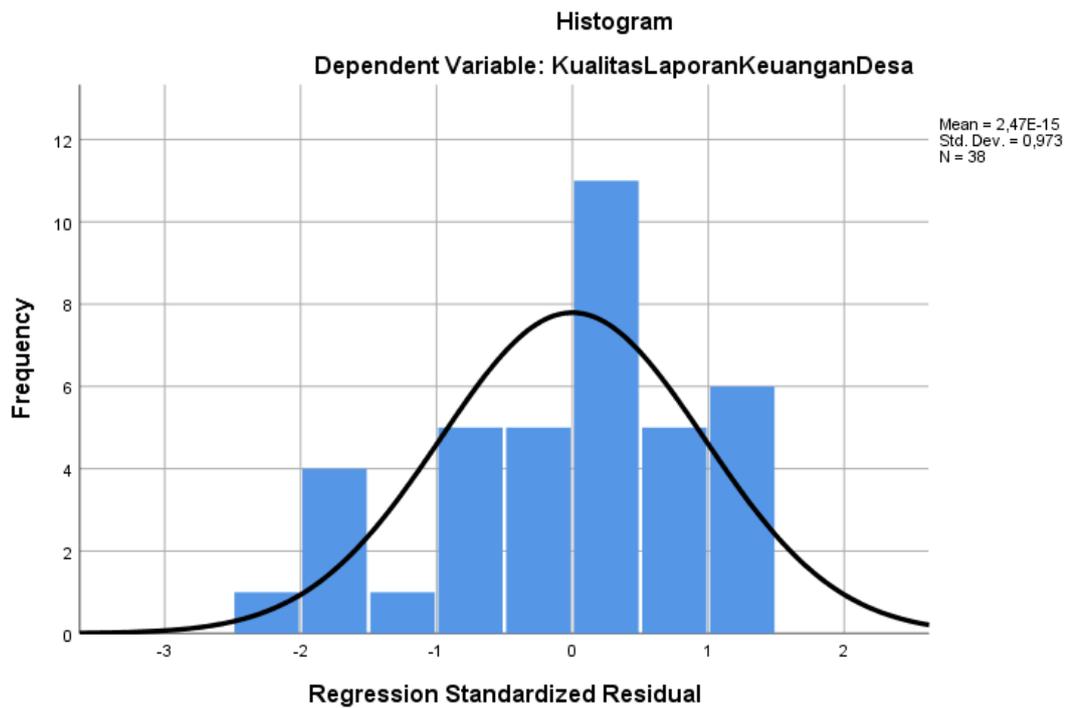
**Gambar 4.7**

**Normal P-P Plot Uji Normalitas**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS versi 25.5**

Data dapat dikatakan normal dalam uji normalitas menggunakan P-P Plot apabila data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Berdasarkan gambar 4.7 yang menunjukkan grafik P-P Plot, data terletak menyebar di sekitar garis diagonal. Sehingga data dapat diartikan terdistribusi secara normal.

Selanjutnya adalah uji normalitas dengan menggunakan histogram. Berikut di bawah ini histogram atas data yang diolah dalam pengujian normalitas :



**Gambar 4.8**

**Histogram Uji Normalitas**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS versi 25.0**

Dalam uji normalitas menggunakan grafik histogram, data dapat dikatakan normal ketika grafik histogram menunjukkan pola yang normal atau mengikuti garis pola yang ada. Berdasar grafik histogram pada gambar 4.8, dapat diketahui bahwa pola yang terbentuk menunjukkan pola distribusi normal. Sehingga data dapat dikatakan terdistribusi secara normal.

**2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana model regresi ditemukan korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Data dikatakan baik jika tidak memiliki korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna. Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu variabel dikatakan tidak

mengalami keadaan multikolinearitas ketika memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai angka *Tolerance* lebih dari 0,1.

**Tabel 4.12**

**Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	2,057	3,272			
	TingkatPendidikanAparaturDesa	-0,196	0,315	-0,1	0,447	2,236
	PemahamanAkuntansiPemerintahan	1,51	0,289	0,842	0,447	2,236

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS versi 25,0.**

Dalam tabel 4.12 diketahui hasil uji multikolinearitas menunjukkan masing-masing nilai *tolerance*. Tingkat Pendidikan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.447, begitu pula dengan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan yang memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,447. Selain itu, tabel 4.12 menunjukan nilai VIF Tingkat Pendidikan Aparatur Desa sebesar 2,236 dan Pemahaman sebesar 2,236.

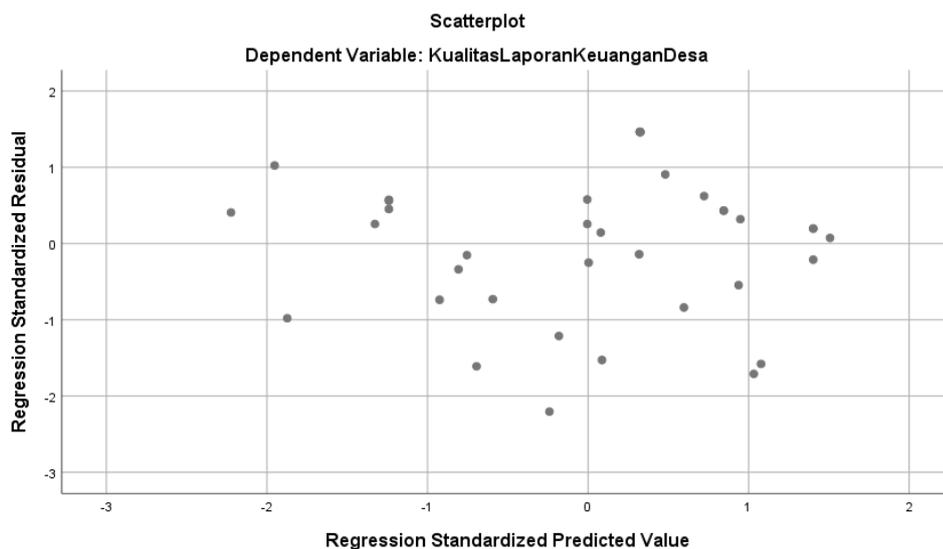
Berdasar hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kondisi multikolinearitas pada model regresi penelitian ini. Karena nilai *tolerance* yang diperoleh tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan  $> 0,1$  dan nilai VIF dari masing-masing  $< 10,0$ .

**3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual sari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Data dapat dikatakan baik apabila tidak mengandung heteroskedastisitas. Adapun pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak terdapat pola tertentu, seperti titik-titik menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi kondisi heteroskedastisitas.

Di bawah ini adalah grafik *scatterplot* yang digunakan untuk menganalisis apakah terjadi kondisi heteroskedastisitas atau tidak. Adapun alat pengujian menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya.



**Gambar 4.9**

### Uji Heteroskedastisitas

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS versi 25.0**

Dapat dilihat berdasar gambar 4.9 bahwa titik-titik yang terbentuk memiliki penyebaran yang merata baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kondisi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

#### 4.2.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuat estimasi koefisien-koefisien persamaan linear, yang mencakup satu atau dua variabel bebas yang dapat secara tepat memprediksi nilai variabel terikat. Adapun persamaan linear berganda yang akan terbentuk dari tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Nilai taksiran Kualitas Laporan Keuangan Desa

X1 = Tingkat Pendidikan Aparatur Desa

X2 = Pemahaman Akuntansi Pemerintahan

$\alpha$  = Konstanta

$b_1, b_2$  = Koefisien Regresi

Menggunakan IBM SPSS versi 25.0 diperoleh hasil analisis regresi berganda sebagai berikut :

**Tabel 4.13**  
**Hasil Estimasi Persamaan Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,057	3,272		,629	,534
1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa	-,196	,315	-,100	-,622	,538
Pemahaman Akuntansi Pemerintahan	1,510	,289	,842	5,224	,000

a. Dependent Variabel: Kualitas Laporan Keuangan Desa (Y)

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS versi 25.0**

Dari perhitungan regresi yang diolah di atas, diperoleh persamaan regresi seagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 2,057 + (-0,196) + 1,510$$

Berdasarkan koefisien yang ada pada persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

$\alpha = 2,057$  Artinya jika ketiga Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan bernilai 0 maka Kualitas Laporan Keuangan Desa akan bernilai 2,057

$X_1 = -0,196$  Artinya jika terjadi kenaikan pada Tingkat Pendidikan Aparatur Desa sebesar satu dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan tetap konstan, maka Kualitas Laporan Keuangan Desa akan meningkat sebesar -0,196.

$X_2 = 1,510$  Artinya jika terjadi kenaikan pada Pemahaman Akuntansi Pemerintahan sebesar satu dan Tingkat Pendidikan Aparatur Desa tetap konstan, maka Kualitas Laporan Keuangan Desa akan meningkat sebesar 1,510.

#### **4.2.2.3 Hasil Uji T (Parsial)**

Pengujian hipotesis parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25.0 dan diperoleh hasil sebagai berikut ;

**Tabel 4.14**  
**Uji Hipotesis Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,057	3,272		,629	,534
1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa	-,196	,315	-,100	-,622	,538
Pemahaman Akuntansi Pemerintahan	1,510	,289	,842	5,224	,000

a. Dependent Variabel: Kualitas Laporan Keuangan Desa (Y)

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS versi 25.0**

Adapun hipotesis statistik secara parsial yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = 0$ , Tingkat Pendidikan Aparatur Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

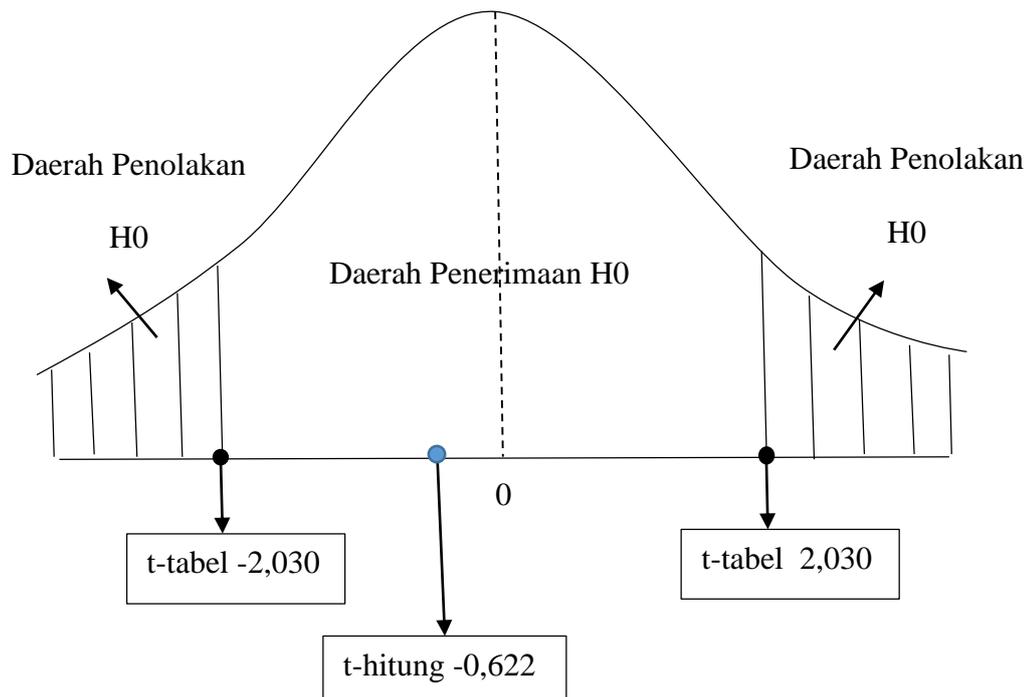
$H_a : \beta_2 \neq 0$ , Pemahaman Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

Diketahui tingkat dignifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 0,05.

$$dk = (n-k-1)$$

$$= (38-2-1) = 35$$

Dari nilai di atas, pengujian dilakukan dari dua arah. Sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,03011

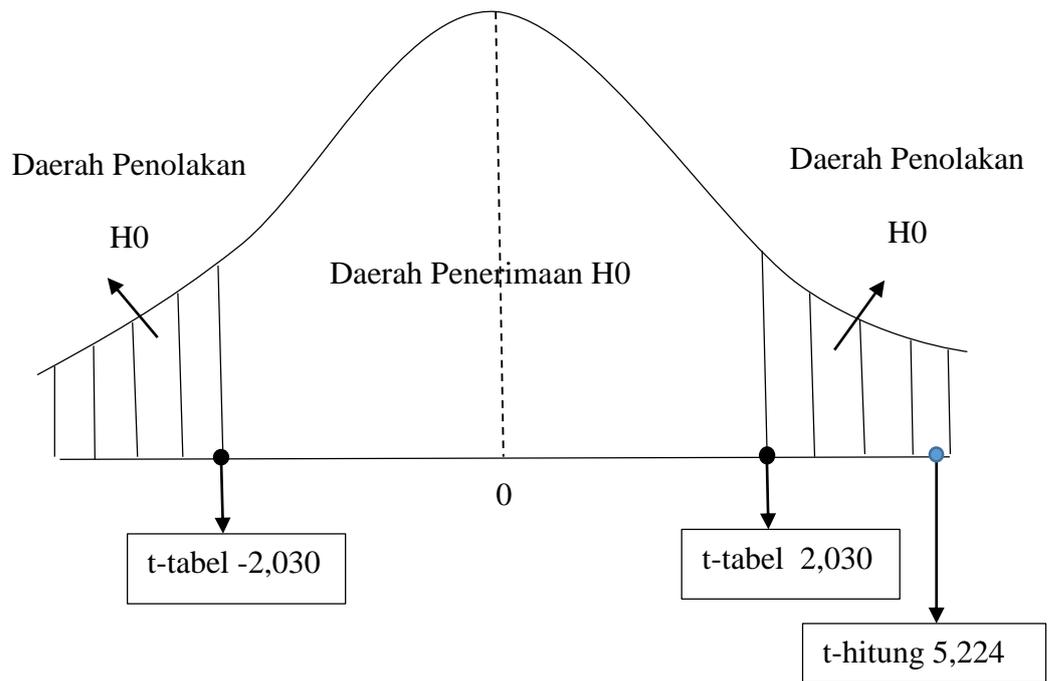


**Gambar 4.10**

**Grafik Penolakan dan Penerimaan H0 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data**

Berdasarkan tabel 4.10, Tingkat Pendidikan Aparatur Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa karena memiliki nilai t-hitung sebesar -0,622 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.538 ( $> 0,05$ ) dan berada di daerah penerimaan H0. Dengan kata lain  $H_a$  ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa.



**Gambar 4.11**

**Grafik Penolakan dan Penerimaan H0 Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data**

Berdasarkan grafik pada gambar 4.11, dapat diketahui bahwa Pemahaman Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Terbukti dengan nilai  $t_{hitung}$  yang perolehnya sebesar 5,224 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ). Nilai tersebut berada di daerah penolakan H0, dengan kata lain  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan.

### 4.2.3 Pengujian Hipotesis (Uji F)

#### 4.2.3.1 Hasil Uji F (Simultan)

Pengujian secara simultan (uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah semua Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa atau tidak. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha :  $\beta_1, \beta_2 \neq 0$ , Artinya Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

**Tabel 4.15**

**Uji Simultan menggunakan tabel Anova**

NOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	609,020	2	304,510	25,536	,000 <sup>b</sup>
	Residual	417,370	35	11,925		
	Total	1026,390	37			
a. Dependent Variabel: KualitasLaporanKeuanganDesa						
b. Predictors: (Constant), PemahamanAkuntansiPemerintahan, TingkatPendidikanAparaturDesa						

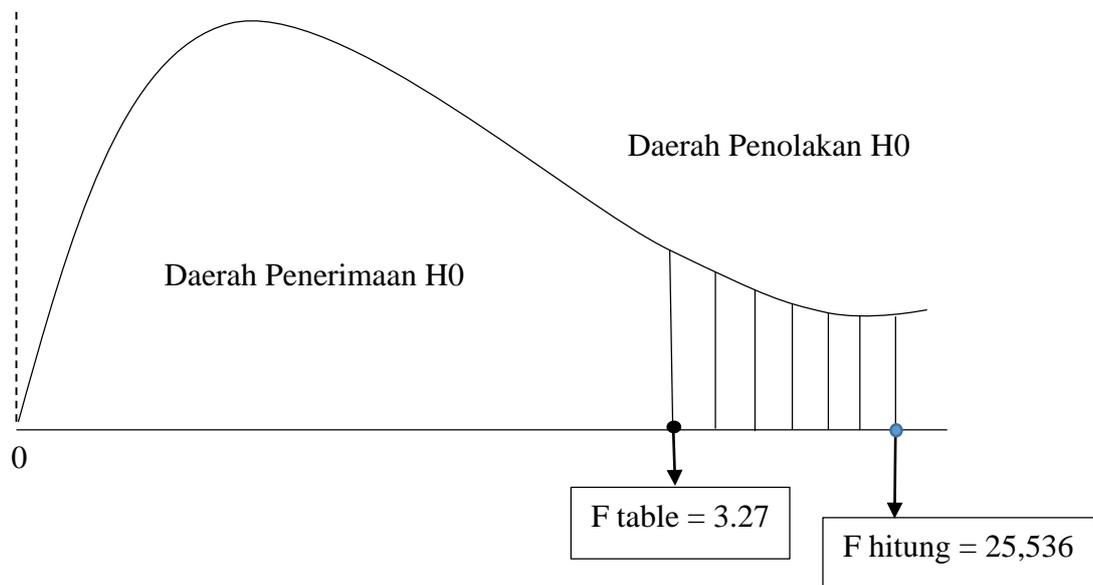
**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS versi 25.0**

Berdasarkan tabel 4.15, diketahui nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh sebesar 25,536 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai inilah yang akan dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$ . Dimana  $F_{tabel}$  dapat diketahui dengan cara sebagai berikut :

$$df (n1) = k-1$$

$$df (n2) = n-k$$

Maka,  $df(n_1) = 3-1 = 2$ ,  $df(n_2) = 38-3 = 35$ . Dari perhitungan itu diperoleh nilai  $f_{tabel}$  sebesar 3,27. Nilai  $F_{hitung}$  sebesar 25,536 lebih besar dibanding dengan nilai  $f_{tabel}$  dengan tingkat kekeliruan 5%, disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa dengan tingkat kepercayaan 95%.



**Gambar 4.12**

**Grafik Penolakan dan Penerimaan  $H_0$  Uji Simultan variabel Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.**

**Sumber : Hasil Pengolahan Data**

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat  $f_{hitung}$  sebesar 25,536 berada di daerah penolakan  $H_0$ . Artinya Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

#### 4.2.3.2 Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur sebesara kuat hubungan antara Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil koefisien korelasi antara Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa sebagai berikut :

**Tabel 4.16**  
**Koefisien korelasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,770 <sup>a</sup>	,593	,570	3,45324
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Akuntansi Pemerintahan, Tingkat Pendidikan Aparatur Desa				
b. Dependent Variabel: Kualitas Laporan Keuangan Desa				

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS versi 25.0**

**Tabel 4.17**  
**Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

**Sumber : Sugiyono (2017:184)**

Berdasarkan table 4.16, diketahui bahwa nilai R menunjukkan angka 0,770. Nilai ini menunjukkan kekuatan hubungan antara ketiga variabel, yakni Tingkat

Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa. Dengan nilai R sebesar 0,770, hubungannya dapat dikategorikan “Kuat”. Sehingga ketika semakin baik variabel independen, maka cenderung diikuti dengan kualitas laporan keuangan desa yang juga meningkat.

#### 4.2.3.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai  $R^2$  kecil, berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai  $R^2$  yang mendekati satu, maka variabel dependen nyaris memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi diperoleh melalui hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS versi 25.0 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.18**  
**Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,770 <sup>a</sup>	,593	,570	3,45324
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Akuntansi Pemerintahan, Tingkat Pendidikan Aparatur Desa				
b. Dependent Variabel: Kualitas Laporan Keuangan Desa				

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS versi 25.0**

Dalam tabel di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi berganda (R) secara simultan sebesar 0,770. Selain itu, diketahui pula nilai *R-square* sebesar 0,593. Nilai *R-square* inilah yang kemudian dikenal juga dengan nama koefisien determinasi (KD). Nilai tersebut menunjukkan kontribusi Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan secara simultan terhadap pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Desa.

Nilai koefisien determinasi juga dapat dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{KD} &= R^2 \times 100\% \\ &= (0,770)^2 \times 100\% \\ &= 59,3\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, kontribusi Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dapat memberikan informasi tentang variasi Kualitas Laporan Keuangan Desa sebesar 59,3%. Sedangkan sisanya sebesar 40,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk melihat seberapa besar pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa perlu dilakukan perhitungan dengan menggunakan formula *Beta x Zero-Order*. Yang dimaksud dengan *Beta* adalah koefisien yang distandarkan, sedangkan *zero order* adalah korelasi parsial dari Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25.0 dan dihasilkan data sebagai berikut :

**Tabel 4.19**  
**Determinasi Parsial**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		
		Standardized Coefficients	Correlations	Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )
		Beta	Zero-order	
1	(Constant)			
	Tingkat Pendidikan AparaturDesa	-,100	,526	-,053
	Pemahaman Akuntansi Pemerintahan	,842	,767	,646
a. Dependent Variabel: KualitasLaporanKeuanganDesa				

**Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25.0**

- a. Berdasarkan tabel 4.19, hasil pengujian menyatakan bahwa dari hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar -0.053. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan Aparatur Desa memberikan pengaruh secara parsial sebesar - 5,3% terhadap kualitas laporan keuangan desa.
- b. Berdasarkan tabel 4.19, hasil pengujian menyatakan bahwa dari hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0.646. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh secara parsial sebesar 64,6.5% terhadap kualitas laporan keuangan desa.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembahasan mengenai tingkat pendidikan aparatur desa di kantor desa kecamatan Ngamprah, pemahaman akuntansi pemerintahan di kantor desa kecamatan Ngamprah, kualitas laporan keuangan di kantor desa kecamatan Ngamprah, pengaruh tingkat pendidikan aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan desa, pengaruh pemahaman akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan desa, serta pengaruh tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

#### **4.3.1 Keadaan Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan di Kantor-Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Bandung Barat**

##### **4.3.1.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa di Kantor-Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa tingkat pendidikan aparatur desa di kantor-kantor desa kecamatan Ngamprah berada di kategori “Sangat Baik”. Hasil ini diperoleh dari perhitungan tanggapan responden sehingga didapatkan kesimpulan bahwa tingkat pendidikan aparatur desa di kantor desa kecamatan Ngamprah tergolong sangat baik. Perhitungan tanggapan responden dilakukan dengan menggunakan 5 pertanyaan yang terbentuk dari dua indikator menurut Peraturan Perundang-Undangan No. 20 Tahun 2003, yakni jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan.

Dari kedua indikator, pada indikator jenjang pendidikan, responden rata-rata memberikan jawaban dalam rentang sangat setuju dan setuju, walaupun ada

saja yang menjawab dengan ragu-ragu. Hal itu membuktikan bahwa aparatur desa di kantor-kantor desa kecamatan Ngamprah cenderung setuju jika diperlukan jenjang pendidikan yang tinggi untuk mampu menghasilkan dan memahami laporan keuangan. Meski pada pelaksanaannya, rata-rata aparatur desa yang bekerja di kantor desa di kecamatan Ngamprah memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK sederajat.

Pada indikator kedua yakni kesesuaian jurusan, responden rata-rata menjawab rentang setuju, ragu-ragu bahkan tidak setuju. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua aparatur desa yang memiliki latar belakang pendidikan non-keuangan tidak mampu menyusun laporan keuangan. Artinya, meskipun rata-rata aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan bukan akuntansi, tetapi mereka tetap mampu menyusun, memahami dan menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas. Karena pada pelaksanaan lapangan, proses penyusunan laporan keuangan desa sudah dilakukan secara komputerisasi menggunakan *software* yang dibuat khusus untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan sampai pelaporan keuangannya.

#### **4.3.1.2 Pemahaman Akuntansi Pemerintahan di Kantor-Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 indikator pemahaman akuntansi keuangan untuk menentukan kondisi pemahaman akuntansi pemerintahan di kantor desa kecamatan Ngamprah. Indikator pemahaman akuntansi merunut pada PSAP Nomor 01 mengenai penyajian laporan keuangan yang meliputi tujuan pelaporan keuangan, tanggung jawab pelaporan, komponen-komponen laporan keuangan, identifikasi laporan keuangan, serta periode

pelaporan. Dari pengujian tanggapan responden diperoleh kategori “Sangat Baik”. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pemahaman akuntansi pemerintahan di kantor-kantor desa kecamatan Ngamprah sudah sangat baik. Terbukti dengan responden yang rata-rata memberikan jawaban setuju dan sangat setuju pada pernyataan yang diajukan. Dari kelima indikator, nilai tertinggi diperoleh dari pernyataan nomor 1 mengenai tujuan laporan keuangan. Hal itu menunjukkan bahwa aparatur desa sudah memahami bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk pengambilan keputusan entitas mengenai alokasi sumber daya. Selain pemahaman terhadap tujuan pelaporan, aparatur desa di kantor-kantor desa kecamatan Ngamprah sudah mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan. Jadi selain pemahaman terhadap tujuan pelaporan keuangan, aspek yang paling dipahami oleh aparatur desa adalah komponen laporan keuangan.

Walaupun tergolong sangat baik, tetapi masih terdapat aparatur desa masih belum mampu membedakan jenis-jenis laporan keuangan yang dilaporkan dalam dokumen terbitan yang sama dengan baik. Maka harus dilakukan pelatihan secara khusus untuk mampu memperkenalkan seluruh jenis laporan keuangan dengan informasi dalam dokumen terbitan yang sama.

#### **4.3.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kantor-Kantor Desa Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan desa berada di kategori yang “Sangat Baik”. Hasil ini diperoleh berdasarkan skor tanggapan responden sehingga disimpulkan kualitas laporan keuangan desa yang dihasilkan di kantor-kantor desa kecamatan Ngamprah sudah sangat baik. Artinya laporan keuangan desa yang disajikan di kantor-kantor desa kecamatan Ngamprah

sudah memiliki kualitas yang baik serta dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengguna.

Jika dilihat dari skor tanggapan responden, skor tertinggi ada pada pernyataan nomor 8 mengenai indikator dapat dipahami. Jadi aparatur desa di kecamatan Ngamprah sudah menggunakan format yang sesuai dengan format yang ditentukan sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pengguna. Semakin baik pengguna memahami laporan keuangan yang disajikan, semakin menyeluruh pula informasi yang dapat diserap dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan desa ini memiliki format yang sama dari satu desa ke desa yang lain. Hal ini dikarenakan penggunaan *software* pengelolaan dana desa yang disiapkan pemerintah agar mempermudah proses penyusunan sampai pelaporan.

Tingkat relevansi laporan keuangan di kantor-kantor desa kecamatan Ngamprah juga tergolong kategori sangat baik. Artinya laporan keuangan di kantor-kantor desa kecamatan Ngamprah sudah memenuhi syarat keandalan laporan keuangan. Sehingga laporan keuangannya dapat dipercaya oleh pengguna yang membutuhkan.

Meski begitu, masih terdapat kelauman dalam laporan keuangan. Aparatur Desa masih belum memaksimalkan fungsi laporan keuangan sebagai alat evaluasi dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

#### **4.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa secara parsial**

##### **4.3.2.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa secara parsial**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Hasil tersebut menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki aparatur desa tidak menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan di kantor desa yang bersangkutan. Meskipun aparatur desa memiliki pendidikan yang tidak berhubungan langsung dengan proses penyusunan laporan keuangan, terbukti bahwa aparatur desa tetap bisa menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, penggunaan *software* Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam proses penyusunan anggaran hingga pelaporan keuangan menjadi salah satu faktor laporan keuangan bisa disusun dengan baik dan merepresentasikan keadaan keuangan desa. Melalui *software* yang disediakan pemerintah tersebut, aparatur desa akan mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan sesuai pedoman yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susma Devi, dkk (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan secara positif berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriani, dkk (2018) yang juga menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Muzahid (2014) juga mengatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal tersebut didukung pula dalam penelitian Trisnawati dan Wiratmadja (2018) dan Udiyanti, dkk (2014).

Meski begitu, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanis, dkk (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan

tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang menjadi salah satu indikator kualitas laporan keuangan. Wungow, dkk (2016) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Fontanella (2010) menegaskan dalam penelitian yang dilakukannya, bahwa latar belakang pendidikan juga tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan di kantor pemerintahan daerah.

#### **4.3.2.2 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemerintahan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa**

Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Artinya semakin tinggi pemahaman aparatur desa terhadap akuntansi pemerintahan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Seseorang dapat dikatakan memahami akuntansi pemerintahan ketika mengerti apa saja tujuan pelaporan keuangan pemerintahan, tanggung jawab pelaporan, periode, identifikasi serta mampu memahami komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan pemerintahan desa. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan pemahaman yang baik sehingga aparatur desa mampu mengimplementasikan hasil laporan keuangan desa untuk mengevaluasi laporan keuangan di periode berikutnya serta mampu mengambil keputusan yang didasari dari laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susma Devi, dkk (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maeka Sari, dkk (2014) juga menyatakan hal

yang sama, bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan Ari, dkk (2014), Krisna Dewi (2014), serta Kartika dan Suhardjo (2013) yang juga melakukan penelitian mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi pemerintahan aparatur desa sudah sangat baik. Sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin meningkat seiring dengan pemahaman yang juga tinggi.

#### **4.3.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa secara Simultan**

Tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa dengan nilai  $f_{hitung}$  sebesar 25,536 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang tinggi secara simultan antara tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Baik tingkat pendidikan aparatur desa maupun pemahaman akuntansi pemerintahan secara bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan suatu kantor desa di kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Artinya semakin baik jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan dalam tingkat pendidikan yang dimiliki aparatur desa dan pemahaman terhadap tujuan, tanggung jawab, komponen, identifikasi dan periode

pelaporan dalam akuntansi pemerintahan, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Susma Devi, dkk (2017) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang disajikan di Bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Aparatur Desa di kantor-kantor desa kecamatan Ngamprah tergolong dalam kategori sangat baik sesuai dengan indikator tingkat pendidikan yang meliputi jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Pemahaman Akuntansi Pemerintahan tergolong dalam kategori sangat baik pula. Penilaian ini sesuai dengan indikator pemahaman akuntansi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga memiliki kategori sangat baik. Artinya aparatur desa sudah mampu menyusun laporan keuangan desa dengan baik sesuai indikator.
2. Tingkat pendidikan aparatur desa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya tidak ada pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan aparatur desa dengan kualitas laporan keuangan. Pemahaman akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin tinggi pemahaman akuntansi pemerintahan yang dimiliki aparatur desa, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
3. Secara simultan tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Jadi secara bersama-sama tingkat pendidikan aparatur desa

maupun pemahaman akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan desa. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi pemerintahan maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis berniat untuk memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi pihak terkait. Adapun saran-saran yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Kantor-kantor desa di kecamatan Ngamprah diharapkan meningkatkan kemampuan aparatur desa khususnya *staff* bagian keuangan serta bendahara desa. Usaha penyeleksian diawal *recruitment staff* keuangan atau bendahara desa. Sehingga *staff* keuangan dan bendahara desa sudah memahami dasar mengenai proses penyusunan laporan keuangan sebagai *basic* pekerjaannya. Untuk meningkatkan pemahaman akuntansi pemerintahan diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang cukup mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP).
2. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa diperlukan peningkatan dalam bidang kualitas pendidikan. Mulai dari pemberian hak kepada setiap aparatur desa untuk terus meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan formal sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuni. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman akuntansi pemerintahan adalah dengan cara memperkenalkan standar akuntansi pemerintahan lebih

dalam melalui pelatihan formal maupun non-formal, penerapan standar akuntansi pemerintahan secara bertahap hingga menyeluruh.

3. Bagi peneliti selanjutnya mengenai tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan desa diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas, jumlah responden yang sesuai, dan penambahan objek penelitian. Misalnya penambahan dengan variabel pengalaman kerja, pelatihan, atau lama masa kerja aparatur desa yang diimprovisasikan dengan objek penelitian ini juga akan menambah kompleksitas hasil penelitian yang bertujuan melihat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 93-111.
- Anwar, C., & Mukadarul, D. M. (2016), *The Influence of Human Resources, Commitment Leader, the Use of Information Technology, and System Internal Control on the Quality of Local Government Financial Report Pringsewu. In International Conference On Law, Business and Governance (Icon-LBG)* (p. 30).
- Dewanty, O. (2018), Pengaruh Teknologi Informasi dan Kemampuan Pengguna Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas
- Diani, D. 2014, Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Negeri Padang
- Ferdous, Dewi, Yussof. (2019), *Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. Management Science Letters*, Vol 9 (2019) 1373–1384
- Fontanella, A. (2010), Analisis Pengaruh latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol 5 nomor 2. ISSN : 1858-3687, halaman 22-30
- Ghozali, I. (2018), Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hakim, R. L. (2017), *Pengaruh Profitabilitas Dan Non Debt Tax Shield Terhadap Struktur Modal (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas Bandung).
- Hasibuan, H. M. (2003), Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Bumi Aksara
- <http://dinikomalaridpress.com>, diakses pada 20 November 2019
- <http://jabarekspres.com/2019/laporan-keuangan-jadi-keluhan/>, diakses pada 07 November 2019

- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370>, diakses pada 25 September 2019
- <http://www.spsstatistik.com/rumus-koefisien-determinasi/>, diakses pada 21 Desember 2019
- <https://jabar.sindonews.com/read/7963/1/syarat-belum-lengkap-5-desa-di-kbb-belum-dapat-add-1560863178>, diakses pada 08 November 2019
- <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190911171557-532-429568/bikin-pusing-pejabat-desa-laporan-dana-desa-akan-dipermudah>, diakses pada 27 September 2019
- <https://www.bandungbaratkab.go.id>, diakses pada 20 November 2019
- <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/06/laporan-diperketat-dana-desa-di-bandung-barat-belum-disalurkan-402572>, diakses pada 08 November 2019
- <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/06/laporan-diperketat-dana-desa-di-bandung-barat-belum-disalurkan-402572>, diakses pada 08 November 2019
- <https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-melakukan-uji-f-simultan-dalam.html>, diakses pada 21 Desember 2019
- Kasim, E. Y. (2015), *Effect Of Government Accountants Competency And Implementation Of Internal Control To The Quality Of Government Financial Reporting. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 8, Issue 1. ISSN 2289-1552*
- Krisna, D. Sinarwati, N. dan Darmawan, N. (2014), Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 Nomor 1*
- Maekasari, N. Adiputra, M. Sujana, E. (2014), Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Vol 2 Nomor 1
- Muda, I, Wardani, Erlina, Maksum, Lubis, Bukit Dan Abubakar. (2017), *The Influence Of Human Resources Competency And The Use Of Information Technology On The Quality Of Local Government Financial Report With Regional Accounting System As An Intervening. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol.95. No 20. ISSN: 1992-8645*
- Murina dan Rahmawaty. (2017), Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol 2, nomor 3, halaman 111-120. E-ISSN : 2581-1002*

- Muzahid, M. (2014), Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 179-196.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Puspitawati, L Anggadini, S.D. (2014), Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Santoso, S. (2010), Statistik Parametrik, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi 6, Buku 1 dan 2. Jakarta:Salemba Empat
- Sugiyono. (2013), Metodologi Penelitian. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2014), Metodologi Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017), Metodologi Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Sukriani, L. Dianita, P. dan Wahyuni, M. (2018), Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan BumDes di Kecamatan Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)* Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 9 nomor 3, (2018). E-ISSN : 2614-2930
- Sunyoto, D. (2016), Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama
- Susma Devi, Herawati, N dan Sulindawati, N. (2017), Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Ukuran Usaha terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM pada Kecamatan Buleleng. *E-Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha jurusan Akuntansi Program S1*, Vol 8 nomor 2, (2017)
- Trisnawati, N. dan Wiratmadja, D. (2018), Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, volumr 24.1. Juli. ISSN : 2302-8556, halaman 768-792

- Udiyanti, N. Atmadja, A. Darmawan, N. (2014), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 2 Nomor 1
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyempurnaan Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wulandari, S., & Suratman, H. S. S. (2018), Pengaruh Efektivitas Dan Kepercayaan Atas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pengguna Sistem (*Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung*) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Wungow, J. Lambey, L. Pontoh, W. (2016), Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan dan Jabatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Vol. 7 No. 2